

BAB IV

Meniscayakan Pendidikan Holistik

PR Pendidikan Nasional

Anggaran pendidikan nasional ditaksir Rp. 371,2 triliun dari total Rancangan APBN 2014 yang mencapai Rp. 1.816,7 triliun. Itu berarti pada 2014 anggaran pendidikan mengalami kenaikan 7,5 persen dari APBN 2013 yang “hanya” Rp. 345,3 triliun. Dari anggaran tersebut, 65 persen (Rp. 241,2 triliun) di antaranya dialokasikan untuk gaji guru dan dosen.

Dilihat dari jumlah, angka itu tergolong fantastis jika dibandingkan alokasi untuk departemen lain. Tetapi, dalam implementasinya alokasi anggaran pendidikan ternyata sangat beragam. Semua bergantung pada pendapatan daerah dan komitmen kepala daerah. Ada daerah tertentu yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen. Sebaliknya, ada daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan jauh di bawah 20 persen.

Padahal Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengamanahkan anggaran pendidikan minimal 20 persen. Persoalan lain yang krusial berkaitan dengan penganggaran bidang pendidikan adalah ketimpangan dalam

mengalokasikan anggaran antara satuan pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Akibat itu, selalu ada kesenjangan mutu antara pendidikan di bawah Kemendikbud dan Kemenag. Di samping itu juga terjadi ketimpangan anggaran yang diberikan pada sekolah yang dikelola pemerintah (negeri) dan yayasan atau organisasi kemasyarakatan (swasta). Faktor ketimpangan anggaran itulah yang mengakibatkan mutu pendidikan belum merata. Akibat itu, kesenjangan mutu pendidikan antar daerah kian melebar. Begitu juga dengan kesenjangan mutu pendidikan umum dan agama serta negeri dan swasta.

Rasanya sudah waktunya pemerintah mengakhiri politik penganggaran bidang pendidikan. Kemendikbud, Kemenag, pemerintah, dan swasta memiliki tugas yang sama-sama mulia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, Kemendikbud dan Kemenag serta pemerintah dan swasta harus sering “bertegur sapa” agar pendidikan nasional semakin bermutu. Besarnya anggaran untuk gaji guru dan dosen semestinya berbanding lurus dengan mutu pendidikan.

Karena faktanya belum terjadi, pemerintah harus membuat regulasi untuk memaksa guru dan dosen agar meningkatkan kinerja. Sebagai ujung tombak pendidikan, guru dan dosen memiliki posisi yang sangat menentukan. Harus disadari bahwa jantung pendidikan itu ada di kelas. Guru dan dosen merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap situasi di kelas. Karena itulah, kita sangat berharap pada perbaikan kinerja guru dan dosen agar mutu pendidikan membaik.

Tetapi, gaji dan tunjangan yang menghabiskan anggaran negara begitu besar ternyata belum dimanfaatkan guru dan dosen untuk meningkatkan kompetensinya. Mendikbud Mohammad Nuh pun mensinyalir bahwa sebagian besar gaji dan tunjangan para pahlawan tanpa tanda jasa itu banyak dimanfaatkan untuk kepentingan konsumtif. Salah satu indikatornya dapat diamati dari belanja guru dan dosen tatkala menerima tunjangan sertifikasi.

Jadi, jangan heran jika tunjangan sertifikasi dirupakan perabotan rumah tangga, pagar rumah, kendaraan, dan barang-barang konsumtif lain. Tunjangan profesi yang diterima guru dan dosen pada setiap bulan jarang yang dimanfaatkan untuk kepentingan

membeli referensi mutakhir, laptop untuk menunjang pembelajaran, serta mengikuti pelatihan, dan forum-forum ilmiah guna meningkatkan kapasitasnya sebagai pendidik. Akibat itu, tambahan kesejahteraan berupa tunjangan profesi belum berdampak positif pada perbaikan mutu pendidikan nasional. Ini jelas menjadi ironi dari kebijakan pemerintah terkait tunjangan profesi pendidik.

Untuk melihat posisi pendidikan nasional, tengoklah hasil survei *Education for All (EFA) Global Monitoring Report* yang dipublikasikan UNESCO pada 1 Maret 2011. Survei itu menempatkan indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-69 dari 127 negara. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Kamboja, dan Laos. Indonesia masih kalah dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Sistem pendidikan yang dianggap terbaik di Asia ditempati Jepang. Sementara negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia adalah Finlandia. Hasil survei *Programme for International Student Assessment (PISA)* pada 2012 juga mengonfirmasi rendahnya posisi pendidikan nasional. PISA menguji kemampuan siswa di tiga bidang yaitu matematika, membaca, dan sains. Survei PISA diikuti lebih dari 510.000 siswa usia 15 tahun di 65 negara.

Hasilnya, di bidang matematika, Indonesia menduduki peringkat ke-64 atau hanya lebih tinggi satu tingkat dari Peru. Di bidang membaca, Indonesia berada di peringkat ke-60 atau setingkat di bawah Malaysia. Sedangkan untuk bidang sains, Indonesia berada di urutan ke-64. Hasil survei ini semakin menegaskan posisi daya saing pendidikan nasional di level dunia.

Di samping persoalan mutu pendidikan yang masih tertinggal dari negara lain, pendidikan nasional juga dikritik karena belum mampu melahirkan pribadi-pribadi yang berkarakter. Sebaliknya justru banyak kasus ketidakjujuran saat ujian nasional (Unas), tawuran antarpelajar, *human trafficking*, narkoba, seks bebas, dan korupsi, yang melibatkan insan terpelajar.

Pendidikan juga direduksi sekadar sebagai tempat produksi ijazah (*diploma mills*). Padahal pendidikan seharusnya berorientasi untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Karena itulah, semua komponen bangsa harus bersinergi untuk menyiapkan generasi emas melalui pendidikan. Pendidikan harus terus dijadikan wacana setiap anak bangsa.

Profesi guru juga harus diperkuat agar semakin menjadi pilihan.

Cara inilah yang digunakan negara-negara maju untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Kita harus menyadari bahwa pelajar hari ini adalah pemimpin masa depan. Untuk itu, pemerintah harus membuat *roadmap* yang berdimensi jangka panjang menuju pendidikan bermutu.

Program jangka panjang pendidikan nasional harus dirumuskan dengan kajian yang mendalam dan berkelanjutan. Pelaksanaan Unas 2013 yang amburadul karena faktor mismanajemen harus menjadi pelajaran. Demikian juga kebijakan Kurikulum 2013 yang hingga tahap implementasinya masih menyimpan banyak masalah.

Semua itu harus menjadi introspeksi pemerintah demi masa depan pendidikan nasional. Bukankah alokasi anggaran pendidikan sudah demikian besar? Asal tidak bermain-main dengan politik dan kekuasaan, pendidikan nasional pasti kian berdaya saing.

Kurikulum Baru dan Guru Inspiratif

Tatkala memberikan tausiah dalam acara *Rembuk Nasional Pendidikan* yang diselenggarakan Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim di Dome UMM (16/2), Profesor Din Syamsuddin menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak dalam posisi mendukung atau menolak Kurikulum 2013. Muhammadiyah akan melaksanakan kurikulum baru dengan tetap menjaga kekhasan pendidikan di lingkungan persyarikatan.

Menurut beliau, saat ini yang jauh lebih penting adalah menyiapkan mutu guru sehingga dapat melaksanakan kurikulum dengan baik tanpa melupakan jati diri pendidikan Muhammadiyah. Itu berarti pendidikan Muhammadiyah tidak boleh memosisikan kurikulum baru sebagai sesuatu yang final, melainkan harus dilihat sebagai standar minimal yang terbuka untuk dikembangkan. Pada konteks inilah penting dipikirkan kekhasan pendidikan Muhammadiyah dibanding yang lain.

Pemerintah pun menetapkan disain implementasi kurikulum baru secara bertahap. Menurut rencana kurikulum baru mulai

diimplementasikan pada tahun ajaran 2013/2014. Sasaran kurikulum baru adalah siswa kelas I dan IV (SD), kelas VII (SMP), dan kelas X (SMA). Itu berarti guru pada kelas-kelas tersebut harus siap menjalankan kurikulum baru. Dalam perkembangannya, Kemendikbud kemudian mewajibkan semua jenjang pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum baru pada tahun ajaran 2014/2015.

Keputusan Kemendikbud itu menuai kontroversi karena menurut disain awal, implementasi kurikulum baru dilaksanakan secara bertahap hingga 2016. Tetapi dengan berseloroh Mendikbud Mohammad Nuh, menyamakan kelompok yang mengritik, apalagi menolak kurikulum baru, laksana orang-orang yang enggan diajak naik kapal Nabi Nuh. Akibatnya mereka akan ditenggelamkan (QS. Hud: 42-43). Pernyataan Mendikbud semakin menguatkan keinginan untuk mengganti kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Tidak ada pilihan lain, Muhammadiyah harus melaksanakan kurikulum baru ini. Yang penting dipahami, karena ujung tombak kurikulum adalah guru maka para pejuang tanpa tanda jasa ini harus berkreasi agar dapat melampaui target minimal yang dibebankan kurikulum. Pada konteks inilah, penulis teringat istilah yang dipopularkan Rhenald Kasali, Gurubesar Fakultas Ekonomi UI, mengenai guru kurikulum dan guru inspiratif.

Guru kurikulum digambarkan sebagai guru yang mengajarkan sesuatu yang standar dan biasa-biasa saja pada murid (*habitual thinking*). Sedang guru inspiratif adalah mereka yang selalu mengajak murid untuk berpikir kreatif dan inovatif dengan cara memaksimalkan potensi yang telah dianugerahkan Allah (*maximum thinking*). Menghadapi kurikulum baru Muhammadiyah jelas membutuhkan kehadiran sebanyak mungkin guru inspiratif.

Tetapi sangat disayangkan, sumber daya yang tersedia di sekolah mayoritas adalah guru kurikulum. Itu dapat diamati dari metode pembelajaran yang dikembangkan. Guru kurikulum biasanya terpaku dengan silabus, rencana praktik pembelajaran (RPP), dan buku teks. Hampir tidak ada ikhtiar dari mereka untuk melihat keluar dan membayangkan jika pembelajaran tidak menggunakan buku teks.

Dalam alam pemikiran guru kurikulum, kewajiban mereka sebatas mematuhi kurikulum. Mereka merasa berdosa jika tidak menuntaskan materi yang ada dalam kurikulum. Standar

keberhasilan pembelajaran guru kurikulum selalu diukur berdasarkan ketuntasan mereka menyampaikan materi pelajaran. Hasil akhirnya, murid sukses mengikuti ujian.

Sementara guru inspiratif tidak terlalu kaku dalam memahami kurikulum. Bagi mereka, kurikulum bukan kitab suci sehingga tidak harus selalu diikuti. Kurikulum harus dipahami sebagai sarana mencapai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. Karena itu model pembelajaran yang dikembangkan lebih kreatif. Buku teks bagi guru inspiratif juga bukan segalanya.

Buku teks hanya dijadikan salah satu sumber belajar. Masih banyak media yang dapat dijadikan sumber belajar. Dengan keyakinan yang kuat maka menjadi pantangan bagi guru inspiratif untuk menanggapi keadaan jika di sekolahnya tidak tersedia buku teks dan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Bagi guru inspiratif, alam sekitar merupakan laboratorium yang sangat bermanfaat untuk menunjang pembelajaran.

Seorang guru akan menginspirasi murid jika mampu keluar dari pakem pembelajaran yang dibebankan kurikulum. Itu berarti untuk menjadi guru inspiratif harus dimulai dengan melakukan perubahan metodologi pembelajaran. Menurut teori pendidikan, pembelajaran yang baik adalah yang menarik hati anak (*pull*).

Karena itu tepat jika dikatakan bahwa proses pendidikan adalah memberikan sebagian hati pada anak. Sebaliknya, pendidikan dianggap kurang berhasil jika melahirkan tekanan (*push*) pada anak. Akibatnya, anak tidak memiliki keberanian untuk mengembangkan daya imajinasinya. Padahal tugas utama guru adalah membantu anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Guru yang terlalu mengekang pasti akan mengakibatkan perasaan rendah diri pada anak. Itu sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa perasaan rendah diri yang dialami orang dewasa selalu berkaitan dengan pola pembelajaran yang dialami orang itu tatkala belajar pada masa kecil. Bahkan pengaruhnya bisa mencapai 90 persen.

Hal itu menunjukkan betapa pembelajaran yang dikembangkan guru turut berpengaruh untuk membentuk karakter anak. Karena itulah keberadaan guru inspiratif sangat dibutuhkan, bukan saja untuk melaksanakan kurikulum baru, melainkan juga untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan.

Mengawal *Start* Kurikulum Kapal Nuh

Mendikbud Mohammad Nuh telah menetapkan sekolah sasaran Kurikulum 2013. Secara keseluruhan jumlah sekolah sasaran kurikulum baru untuk tahun 2013 mencapai 6.325 sekolah yang tersebar di seluruh provinsi dan 295 kabupaten/kota. Jika melihat jumlah sekolah sasaran yang berkisar hanya 5 persen dari seluruh sekolah di tanah air, maka sejatinya program ini lebih layak disebut uji coba atau *pilot project* kurikulum baru. Tetapi karena ingin menjaga kehormatan (*marwah*) pejabat publik, program ini pun tetap dinamakan implementasi kurikulum baru.

Sangat disayangkan, persiapan implementasi kurikulum baru jauh dari harapan. Sebagai contoh, training kepala sekolah dan guru bagi sekolah sasaran baru diadakan pada 8-13 Juli 2013. Sementara itu, tahun ajaran baru 2013/2014 sudah harus dimulai pada 15 Juli. Karena itulah dapat dibayangkan betapa repotnya persiapan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum baru. Padahal kepala sekolah dan guru sekolah sasaran belum memiliki

pemahaman yang utuh mengenai filosofi dan konten kurikulum baru.

Pertanyaannya, bagaimana mereka harus menjalankan kurikulum yang faktanya belum dipahami dengan baik? Seharusnya persiapan untuk melaksanakan kurikulum baru direncanakan secara matang dan berkelanjutan. Jadi, tidak boleh dikerjakan asal-asalan dan tergesa-gesa. Apalagi ini berkaitan dengan nasib pendidikan nasional di masa mendatang. Akibat pelaksanaan yang tergesa-gesa itulah kemudian muncul begitu banyak spekulasi.

Sebagian spekulasi mengaitkan program kurikulum baru dengan kebutuhan dana dari partai politik tertentu untuk menghadapi pemilu 2014. Ada juga spekulasi yang melihat pelaksanaan kurikulum baru semata-mata sebagai “proyek”. Dalam perspektif ini, semua program dilihat sebagai pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. Diakui atau tidak, sebagian birokrat masih berpola pikir demikian.

Beberapa spekulasi tersebut memang tidak dapat dihindari. Sebab, kita memang sedang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mudah percaya pada orang lain (*low trust*). Akibatnya, program sebaik apa pun akan tetap dicurigai. Apalagi jika program itu tidak dirancang secara partisipatif dan transparan. Ditambah lagi dengan pelaksanaannya yang tergesa-gesa.

Program kurikulum baru sejauh ini juga masih menyisakan banyak pekerjaan. Sebagai contoh, banyak sekolah sasaran yang terlambat menerima “buku babon” dan “buku siswa” yang dijanjikan Kemendikbud untuk setiap mata pelajaran. Ketersediaan *master teacher* yang beranggotakan guru-guru inti dan terlatih sebagai ujung tombak implementasi kurikulum baru juga masih berjalan lambat.

Beberapa persoalan tersebut jelas dapat mengganggu persiapan dinas pendidikan tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan sekolah sasaran. Dengan persiapan yang amburadul seperti itu rasanya tidak berlebihan jika sebagian pemerhati pendidikan menanyakan keseriusan pemerintah. Tetapi, Mendikbud selalu mengatakan bahwa pelaksanaan kurikulum baru tidak boleh ditunda. Apalagi skema implementasi kurikulum baru sudah terlanjur diumumkan. Dalam skema itu ditetapkan bahwa untuk tahap awal sasaran kurikulum baru adalah siswa kelas I dan IV (SD), kelas VII (SMP), dan kelas X (SMA/SMK).

Mendikbud menanggapi sejumlah kritik tentang implementasi kurikulum baru dengan santai. Bahkan dengan berseloroh

Mendikbud menyamakan kelompok yang selalu mengkritik dan menolak kurikulum baru laksana orang-orang yang enggan diajak naik kapal Nabi Nuh. Akibatnya, mereka pun ditenggelamkan Tuhan (QS. Hud: 42-43). Ilustrasi Mendikbud yang kebetulan punya nama “Nuh” itu sekaligus menjadi ancaman bagi penolak kurikulum baru.

Mendikbud pun tidak memberikan pilihan lain. Kurikulum baru harus dilaksanakan untuk menggantikan Kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Sekolah yang telah ditetapkan sebagai sasaran implementasi kurikulum harus menjalankan keputusan Mendikbud. Mendikbud sepertinya ingin mengatakan; “pemerintah *kok* dilawan”. Ibarat anjing menggonggong, kafilah pun tetap berlalu.

Persoalan krusial yang layak disorot dalam implementasi kurikulum baru adalah kesiapan guru. Hal itu penting karena ujung tombak pendidikan sejatinya guru. Pahlawan tanpa tanda jasa itulah yang akan menentukan kesuksesan dan kegagalan pelaksanaan kurikulum baru. Sementara Mendikbud pasca pemilu 2014 harus berganti. Karena itu, beban yang ditanggung para guru sejatinya sangat berat. Mereka harus siap untuk disalahkan jika implementasi kurikulum baru tidak maksimal.

Indikasi bakal tidak maksimalnya implementasi kurikulum baru sesungguhnya dapat diprediksi. Misalnya, banyak guru SD yang menanyakan konten sekaligus contoh model pendidikan “tematik integratif”. Guru SMP dan SMA pengajar TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), yang kebetulan mata pelajarannya tereliminasi dalam kurikulum baru juga menanyakan nasibnya.

Apalagi mereka telah tersertifikasi sebagai guru mata pelajaran TIK. Pertanyaannya, bagaimana nasib sertifikasi mereka? Bukankan guru yang telah tersertifikasi berkewajiban untuk mengajar minimal 24 jam? Itulah sebagian pertanyaan yang menunjukkan kegamangan guru untuk mengimplementasikan kurikulum baru.

Jika melihat dokumen, sejatinya kurikulum baru itu sangat baik. Tetapi, idealnya kurikulum tidak hanya baik dalam tataran konsep. Yang juga penting dipikirkan adalah implementasinya. Karena itulah banyak pihak mengusulkan agar pelaksanaan kurikulum baru ditunda. Pemerintah harus memperbaiki sumber daya guru terlebih dulu.

Sebab, sebagus apa pun kurikulum itu dikonsep, pelaksananya

tetap guru. Sementara, realitas menunjukkan bahwa masih banyak guru yang mutunya rendah (*under qualified*). Rendahnya mutu guru itu dapat diamati dari hasil uji kompetensi guru (UKG). Dalam beberapa kali UKG tampak sekali bahwa pendidikan kita masih memiliki persoalan dengan mutu guru.

Yang aneh justru hasil ujian nasional (Unas). Hasil Unas selalu menunjukkan capaian yang membanggakan. Bahkan banyak sekolah yang berhasil meluluskan 100 persen siswanya. Padahal jika berkaca pada hasil UKG, semestinya tingkat kelulusan siswa tidak begitu tinggi. Karena ujung tombak pelaksanaan kurikulum masih banyak yang bermasalah maka mari kita kawal implementasinya.

Mengevaluasi Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum baru telah berlangsung satu semester (Juli-Desember 2013). Setidaknya ada 6.326 sekolah yang menjadi sasaran implementasi kurikulum baru. Termasuk 24 sekolah Muhammadiyah Jatim. Selain sekolah sasaran, ternyata banyak sekolah yang ingin melaksanakan kurikulum baru meski dengan biaya mandiri. Tetapi karena implementasi kurikulum ini cenderung dipaksakan pusat dan tidak banyak melibatkan daerah maka problem di lapangan menjadi tak terhindarkan.

Umumnya problem implementasi kurikulum baru berkaitan dengan pendanaan. Misalnya, pendanaan untuk pelatihan kepala sekolah dan guru serta pengadaan buku bagi guru dan siswa. Problem tak kalah pelik dialami guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum. Hal itu dapat dipahami karena sebegus apa pun kurikulum dikonsep oleh para ahli, tetap saja bergantung pada kesiapan guru.

Ada fakta menarik dari hasil sensus terhadap implementasi

kurikulum baru. Sensus dilaksanakan kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) tiga bulan setelah implementasi kurikulum. Hasil sensus menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum memahami konsep pembelajaran tematik. Akibatnya guru mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran.

Hasil sensus juga menginformasikan pandangan guru terhadap kurikulum baru. Menurut para guru, secara konsep kurikulum baru sangat bagus karena memberikan kebebasan untuk berkreasi. Persoalannya, guru mengalami kesulitan dalam memraktekan. Kebingungan guru semakin menjadi karena tidak semua buku tersedia. Guru juga dibingungkan dengan model penilaian.

Sejatinya Kurikulum 2013 tidak banyak berbeda dengan Kurikulum 2006, yang lebih populer disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Proses pembelajarannya pun partisipatif dengan melibatkan siswa. Perbedaan utamanya ada pada materi ajar, baik untuk guru maupun siswa, yang dikemas dalam bentuk tematik. Kurikulum baru juga menekankan pentingnya kegiatan berpikir bagi siswa, mulai observasi, menanya, eksperimentasi, hingga menemukan solusi. Pembelajaran ini memungkinkan siswa belajar secara otentik (*authentic learning*).

Seharusnya guru tidak perlu galau dengan kurikulum baru. Jika tidak percaya, cobalah tanyakan pada guru yang kini masih aktif mengajar. Mereka pasti merasakan pergantian kurikulum hingga beberapa kali. Mereka pernah memraktekan Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi/ KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), dan Kurikulum 2013. Pertanyaannya, apa yang berubah dalam pembelajaran mereka seiring dengan perubahan kurikulum? Jawabannya, hampir pasti tidak ada yang berubah. Karena itu guru harus tetap tenang mendidik siswa apa pun kurikulumnya.

Jika mencermati kegalauan guru maka terasa sekali bahwa dunia pendidikan kita membutuhkan guru yang andal. Meminjam istilah Rhenald Kasali, Gurubesar Fakultas Ekonomi UI, pendidikan kita membutuhkan guru-guru inspiratif. Mereka sering diilustrasikan sebagai pendidik yang selalu mengajak siswa untuk berpikir kreatif dengan memaksimalkan potensi yang telah dianugerahkan Tuhan (*maximum thinking*). Antitesa guru inspiratif adalah guru kurikulum, yakni mereka yang mengajarkan sesuatu yang standar dan biasa-biasa saja (*habitual thinking*).

Guru inspiratif pasti selalu berpikir positif jika terjadi perubahan kurikulum. Buku teks bagi guru inspiratif juga bukan segalanya. Buku teks hanya salah satu sumber belajar. Masih banyak media yang dapat dijadikan sumber belajar. Dengan perspektif itu maka menjadi tantangan bagi guru inspiratif untuk menanggapi keadaan jika di sekolahnya tidak tersedia buku teks. Begitu juga dengan persoalan keterbatasan perangkat informasi teknologi (IT). Dalam perspektif guru inspiratif, alam sekitar pun dapat dijadikan laboratorium untuk menunjang pembelajaran.

Kemendikbud sepertinya telah menutup mata dan telinga dari suara-suara kritis dan korektif terhadap implementasi kurikulum baru. Kemendikbud bahkan menetapkan bahwa pada 2014 semua kelas dan jenjang pendidikan harus sudah mengimplementasikan kurikulum baru. Kebijakan ini jelas berbeda dengan rencana semula, yang mencanangkan tahapan pelaksanaan kurikulum baru hingga 2015. Karena itu sulit menolak logika yang mengaitkan perubahan skema implementasi kurikulum baru dengan pemilu 2014. Pejabat Kemendikbud pasti merasa bahwa semuanya akan berubah setelah pemilu, termasuk menteri pendidikannya.

Pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan Muhammadiyah untuk menghadapi kebijakan Kemendikbud yang terus berubah? Jika menilik usia Muhammadiyah yang jauh lebih tua dari negeri ini maka idealnya pendidikan kita memiliki kurikulum tersendiri. Kurikulum yang kira-kira tahan godaan, termasuk godaan politik dan kekuasaan.

Karena rancang bangun kurikulum pendidikan Muhammadiyah mutlak dibutuhkan maka gagasan itu harus terus digelorakan. Spiritnya, pendidikan Muhammadiyah harus menjadikan kurikulum pemerintah sebagai standar minimal. Itu berarti kurikulum pendidikan Muhammadiyah harus dirancang melampaui kurikulum pemerintah. Dengan sumber daya yang melimpah, Muhammadiyah pasti bisa.

Menyongsong Ujian Nasional

April dan Mei biasanya digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Ujian Nasional (Unas). Biasanya diawali Unas tingkat SMA/SMK/MA, kemudian disusul SMP/MTs. Sementara untuk SD/MI, meski sejak tahun 2014 pemerintah menghapus Unas dengan mengganti ujian sekolah, tapi “nuansanya” tetap sama.

Seiring semakin dekatnya pelaksanaan Unas, siswa kelas akhir jenjang pendidikan dasar dan menengah bersiap untuk menyongsong Unas. Karena itu, jangan heran jika pembelajaran di sekolah saat mendekati Unas lebih didominasi latihan (*try out*) soal-soal Unas. Di samping ikhtiar yang bersifat akademik, sekolah juga melaksanakan beragam kegiatan training spiritual untuk memberikan peneguhan berupa keyakinan pada siswa.

Bahkan ada sekolah yang secara rutin menyelenggarakan doa bersama (*istighasah*), shalat tahajud, dan ziarah wali. Semua itu dilakukan agar siswa siap lahir dan batin menghadapi Unas. Beban

lebih berat akan dirasakan guru kelas akhir setiap jenjang pendidikan karena guru kelas akhir diliputi kecemasan terhadap persiapan anak didiknya saat Unas tiba.

Itulah sebabnya banyak guru yang enggan mengajar kelas akhir, terutama untuk mata pelajaran yang di-Unas-kan. Padahal kesuksesan anak mengerjakan soal-soal Unas bukan hanya tanggung jawab guru kelas akhir, melainkan semua guru dan orang tua. Karena memegang posisi yang sangat menentukan, guru harus menerima kenyataan untuk disalahkan ketika hasil Unas kurang memuaskan. Pandangan yang menempatkan guru sebagai faktor utama kesuksesan Unas tentu sangat beralasan.

Tetapi, jangan lupa, dukungan orang tua pada anak juga sangat penting. Faktor dukungan orang tua ini sangat berarti untuk membesarkan hati (*encouragement*) anak agar menjalani Unas dengan tenang. Orang tua dapat mendorong anaknya meraih prestasi setinggi mungkin dengan tetap menjunjung nilai-nilai kejujuran. Orang tua sesungguhnya dapat menjadi agen mengampanyekan kejujuran saat Unas.

Faktor yang juga turut menambah beban siswa saat pelaksanaan Unas adalah tekanan pejabat publik. Pejabat terkait seperti kepala dinas pendidikan mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota biasanya ikut mematok target angka kelulusan. Pejabat publik yang tidak berhubungan secara langsung dengan pendidikan seperti presiden, gubernur, bupati, dan wali kota bahkan turut menaruh perhatian dengan tingkat kelulusan siswa.

Kepala daerah jelas menyadari bahwa dalam konteks politik pencitraan, tingkat kelulusan dapat menjadi media untuk membangun citra kepemimpinannya. Seharusnya semua pihak mengajak siswa untuk menghadapi Unas dengan sewajarnya. Jika perlu, siswa harus digembirakan seraya diajak untuk bernyanyi, "Unas telah tiba; Unas telah tiba; hore, hore; hatiku gembira." Cara ini bagian dari ikhtiar untuk mengurangi beban psikologis siswa yang meningkat saat Unas.

Guru juga harus berkeyakinan bahwa sepanjang mereka telah melakukan proses belajar dan mengajar (PBM) dengan baik tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Umumnya guru yang menempatkan Unas sebagai beban adalah mereka yang tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan PBM. Mereka pun tidak memiliki rasa percaya diri saat siswanya mengikuti Unas. Akibat itu, mereka akan mudah

tergoda untuk berperilaku tidak jujur.

Perilaku tidak jujur itu dilakukan karena guru seringkali tidak dapat menerima kenyataan siswanya memperoleh nilai jeblok. Pertimbangan lain berkaitan dengan citra sekolah jika hasil Unas tidak baik. Dalam alam pikiran guru dan kepala sekolah, citra sekolah salah satunya dilihat dari keberhasilannya dalam meluluskan siswa. Persentase kelulusan siswa dapat menjadi media untuk meyakinkan stakeholders-nya.

Karena pemerintah masih berkeyakinan untuk melaksanakan Unas, tidak ada pilihan lain, semua pihak harus diajak untuk menyongsong Unas dengan penuh optimisme. Semua pihak harus berkomitmen dengan berikrar; prestasi yes, jujur harus. Komitmen ini penting karena persoalan kejujuran saat Unas selalu menjadi perhatian. Karena masih sering terjadi ketakjujuran (*dishonesty*) itulah banyak pihak mempersoalkan kredibilitas Unas.

Padahal mulai tahun ini nilai Unas akan menjadi pertimbangan dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Untuk mengurangi angka ketakjujuran, pemerintah mempertahankan mekanisme penentuan kelulusan siswa yang dihitung berdasarkan pembobotan; Unas (60 persen) dan US (40 persen).

Itu berarti secara normatif Unas seharusnya dipahami bukan satu-satunya penentu kelulusan. Guru masih memiliki porsi yang cukup untuk menentukan kelulusan. Tetapi, semua orang tahu, perspektif sekolah terhadap Unas tetap yang terutama. Kebijakan yang juga layak diapresiasi adalah variasi soal Unas hingga 20 paket.

Itu berarti jika dalam satu kelas ada 20 siswa, mereka pasti akan mengerjakan soal yang berbeda. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi perilaku tak jujur saat Unas. Untuk mewujudkan Unas yang jujur dan kredibel jelas membutuhkan komitmen semua pihak. Semua pihak harus menyadari bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang.

Capaian nilai anak dari hasil Unas jelas bukan tujuan pendidikan. Ujian harus dipahami sebagai salah satu tahapan yang harus dilalui siswa untuk menapaki jenjang pendidikan selanjutnya. Karena itulah, siswa harus diyakinkan bahwa yang jauh lebih penting dalam Unas adalah berperilaku jujur. Sementara persoalan nilai tentu sangat bergantung pada kesiapan setiap siswa.

Berkaitan dengan keinginan untuk mewujudkan Unas yang jujur dan kredibel, kita telah diingatkan Indonesia Corruption

Watch (ICW). Dalam salah satu pernyataannya, ICW mengingatkan bahwa perilaku tidak jujur saat ujian itu sangat berkorelasi dengan budaya korupsi. Peringatan ini layak dikemukakan karena jika kita telisik latar belakang pelaku korupsi, ditemukan fakta bahwa mereka adalah produk lembaga pendidikan. Diantara mereka bahkan alumni perguruan tinggi. Agar generasi masa depan bangsa tidak terlibat korupsi, budaya jujur harus ditanamkan sejak dini.

Menyoal Kredibilitas Unas

Hasil Ujian Nasional (Unas) untuk SMA/MA/ SMK secara resmi telah diumumkan pada tanggal 20 Mei 2014. Tingkat kelulusan SMA/MA mencapai 99,52 persen, turun jika dibanding Unas 2013 sebesar 99,53 persen. Sedangkan tingkat kelulusan SMK adalah 99,90 persen, turun jika dibanding tahun lalu yang mencapai 99,94 persen. Data ini menunjukkan bahwa angka ketidaklulusan Unas meningkat.

Yang paling mencolok adalah ketidaklulusan SMK yang jika dianggakan mencapai 1.159 siswa. Padahal tahun lalu angka ketidaklulusan SMK hanya 601 siswa. Data Kemendikbud juga melaporkan bahwa rata-rata nilai Unas SMA tahun ini adalah 6,12. Nilai ini sedikit lebih rendah dari rata-rata hasil Unas tahun lalu yakni 6,32.

Rata-rata nilai Unas juga lebih rendah dari rata-rata nilai ujian sekolah yang mencapai 8,39. Data ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan sekolah memberikan nilai tinggi saat ujian sekolah. Karena itu, nilai Unas penting sebagai pembanding nilai ujian

sekolah. Melihat capaian hampir 1,7 juta anak SMA yang mengikuti Unas, jelas nilai mereka masih sangat rendah. Karena itu, harus ada intervensi dari *stakeholders* pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan SMA.

Variabel terpenting dari keinginan untuk meningkatkan mutu lulusan adalah guru. Peranan guru sangat penting karena menjadi ujung tombak pendidikan. Bukankah jantung pendidikan itu selalu ada di kelas? Dan, gurulah yang bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar di kelas.

Selain persoalan rata-rata nilai yang rendah, Unas tahun ini juga dinodai berbagai kasus ketidakjujuran. Yang lebih menyedihkan, kasus itu melibatkan kepala sekolah (kasek) dan guru. Pemerhati dan praktisi pendidikan pasti kaget tatkala membaca berita bahwa ada 70 kasek dan guru berkomplot untuk mencuri soal Unas. Kasus memalukan ini terjadi di Kabupaten Lamongan, Jatim. Kasus ini jelas menjadi potret buram pelaksanaan Unas 2014.

Tidak tertutup kemungkinan jika kasus ketidakjujuran dalam Unas SMA layaknya fenomena gunung es. Artinya, kasus ketidakjujuran yang melibatkan kasek dan guru sesungguhnya sangat banyak. Hanya, kasus-kasus itu luput dari perhatian publik karena belum terendus media. Apalagi dalam perkembangan penyelidikan aparat kepolisian, kasus pencurian soal oleh kepala sekolah dan guru itu ternyata berkaitan dengan jaringan joki gosok.

Melalui joki gosok dan jaringannya inilah praktik jual beli kunci jawaban Unas menyebar hingga di Surabaya. Setidaknya ada delapan SMA negeri di Surabaya yang terlibat jaringan joki gosok. Dampak dari berbagai kasus ketidakjujuran itu menyebabkan publik kurang percaya dengan hasil Unas. Kredibilitas hasil Unas pun terus dipersoalkan. Karena itu, sejumlah rektor menolak untuk menjadikan nilai Unas SMA sebagai salah satu komponen penilaian masuk perguruan tinggi negeri. Para rektor menilai hasil Unas tidak lagi mencerminkan kemampuan yang sebenarnya dari siswa.

Padaahal Mendikbud Mohammad Nuh berulang memerintahkan pada para rektor untuk menjadikan hasil Unas sebagai dasar penerimaan mahasiswa baru. Persoalan ketidakjujuran yang selalu mewarnai pelaksanaan Unas secara tidak langsung juga diakui pemerintah. Itu dapat diamati dari kebijakan Kemendikbud yang mengubah soal Unas dari lima paket menjadi 20 paket. Di samping itu, pengamanan soal Unas juga dilakukan superketat. Tidak cukup

pengawas dari kalangan sipil, aparat kepolisian pun dilibatkan untuk menjaganya.

Pelibatan aparat kepolisian secara masif menunjukkan antisipasi Kemendikbud untuk menjaga Unas dari praktik tidak jujur. Rasanya tidak pernah ada pelaksanaan ujian di negara-negara lain yang dijaga begitu banyak aparat kepolisian sebagaimana yang terjadi di Tanah Air. Meski Unas telah dijaga aparat kepolisian, praktik tidak jujur tetap terjadi. Itu karena budaya tidak jujur telah menyebar hampir seluruh bidang kehidupan.

Untuk meniadakan praktik ketidakjujuran saat Unas, pasti dibutuhkan waktu karena itu terkait budaya. Meski begitu, Kemendikbud dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil ujian harus terus berusaha untuk membangun budaya jujur. Dalam kaitan ini pihak-pihak yang terlibat praktik ketidakjujuran harus ditindak tegas. Langkah inilah yang tampaknya belum dilakukan Kemendikbud. Justru aparat kepolisian yang kelihatan serius untuk menyelidiki kasus pencurian soal dan peredaran kunci jawaban Unas.

Kemendikbud seharusnya terlibat aktif menyelesaikan kasus ketidakjujuran Unas. Jika perlu, ada pemberian sanksi keras misalnya pemecatan kepada kasek dan guru komplotan pencuri soal Unas. Langkah ini penting agar menjadi pelajaran bagi kasek dan guru lain. Di samping pemberian sanksi yang bersifat personal, sanksi seharusnya juga diberikan pada sekolah. Apalagi jika dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa sekolah telah melakukan pembiaran terhadap praktik ketidakjujuran.

Dalam hal ini sanksi pada sekolah dapat berupa penurunan status akreditasi. Pengalaman negara-negara maju seperti Singapura layak dijadikan referensi. Negeri jiran Singapura telah menerapkan sanksi penurunan status akreditasi bagi sekolah yang tidak jujur saat Unas. Hukuman ini ternyata sangat efektif untuk meminimalkan praktik ketidakjujuran. Apalagi tindakan itu kemudian diikuti dengan ekspose ke media. Sekolah mana pun akan takut jika diumumkan ke media telah melakukan praktik ketidakjujuran saat Unas.

Jika langkah tersebut dicontoh Kemendikbud, rasanya akan memberikan efek jera pada kepala sekolah dan guru. Sementara sekolah yang diturunkan status akreditasinya karena kasus ketidakjujuran pasti akan ditinggalkan stakeholders-nya. Sekolah ini pada saatnya tidak akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat

hingga kemudian gulung tikar. Persoalannya, kini berpulang pada keberanian Kemendikbud. Beranikah Kemendikbud memberikan sanksi pada pihak-pihak yang telah menodai UN dengan menyebarkan virus ketidakjujuran? Rasanya masyarakat akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Kemendikbud jika berani bersikap tegas.

Kita harus berempati pada anak-anak yang sudah bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan berperilaku jujur saat Unas. Mereka terpaksa harus menerima kenyataan hasil Unasnya dinilai tidak kredibel akibat kasus ketidakjujuran yang dilakukan oknum tertentu.

Ganti Unas Dengan Penilaian Otentik

Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) kini memiliki payung hukum untuk menghapus ujian nasional (Unas) SD seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013. Dengan berlandaskan pada PP tersebut, Kemendikbud tidak memiliki pilihan lain kecuali menjalankan perintah menghapus Unas SD. Sebagai penggantinya, evaluasi akhir untuk pembelajaran peserta didik SD harus dikembalikan ke sekolah. Itu berarti guru memiliki otoritas untuk menentukan hasil belajar anak.

Tugas Kemendikbud selanjutnya adalah merumuskan program yang berkelanjutan untuk menyiapkan guru agar mampu mengemban tugas evaluasi pembelajaran dengan baik. Hal ini penting dikemukakan karena kebijakan sebaik apa pun selalu mengundang perdebatan. Apalagi pemerintah sedang berhadapan dengan masyarakat yang mengidap penyakit krisis kepercayaan (*low trust*). Kelompok yang tetap menghendaki pelaksanaan Unas pasti akan

mempertanyakan kesiapan guru. Apalagi realitas menunjukkan bahwa masih banyak guru yang berkualifikasi rendah (*under qualified*). Fenomena itu setidaknya dapat diamati dari hasil uji kompetensi guru yang telah dijalankan pemerintah.

Di lain pihak, penentang Unas menanyakan; mengapa hanya Unas SD yang dihapus? Bagaimana dengan Unas SMP dan SMA? Jika Unas SMP dan SMA tetap dijalankan, itu berarti kebijakan pemerintah masih setengah hati. Padahal setelah melihat karut-marut pelaksanaan Unas 2013, rasanya inilah momentum yang tepat untuk mengganti Unas dengan sistem evaluasi yang lebih kredibel. Penghapusan Unas untuk semua jenjang pendidikan juga sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun.

Kemendikbud juga dikritik karena selalu mengaitkan Unas dengan peningkatan mutu pendidikan. Padahal jika melihat ranking pendidikan nasional di level dunia, posisi kita masih tercecceh di bawah. Menurut data *Education for All (EFA) Global Monitoring Report* yang dikeluarkan Unesco pada 1 Maret 2011, indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-69 dari 127 negara. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Kamboja, dan Laos. Indonesia pun kalah bersaing dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei.

Data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan antara Unas dengan mutu pendidikan. Sebagai contoh, Singapura merupakan negara yang menerapkan Unas (*national examination*). Tetapi kita semua tahu sistem pendidikan Singapura termasuk salah satu yang terbaik di Asia. Dalam sistem pendidikan Singapura, Unas untuk SD diberi nama *Primary School Leaving Examination* (PSLE). Sementara untuk SMP dan SMA adalah *Ordinary Level* (O-Level) dan *Advance Level* (A-Level).

Yang membedakan, Unas di Singapura tidak dijadikan alat untuk menentukan kelulusan anak. Semua anak yang mengikuti Unas dinyatakan lulus. Hasil Unas di Singapura sepenuhnya digunakan untuk menentukan masa depan pendidikan anak. Bagi anak dengan kualifikasi hebat di bidang akademik, maka ia berpotensi untuk melanjutkan kuliah di universitas. Sebaliknya, anak yang kualifikasi akademiknya kurang, diberikan pilihan untuk mengambil program vokasional di politeknik. Sistem ini terkesan sederhana, tetapi visinya sangat jelas dan dilakukan dengan penuh kesungguhan.

Pertanyaannya, bagaimana pemerintah Singapura membangun budaya jujur? Ternyata kuncinya ada pada sanksi untuk mereka yang berperilaku tidak jujur saat Unas. Sekolah yang tidak menyelenggarakan Unas dengan jujur akan diturunkan status akreditasinya. Sanksi ini sangat berat karena dapat mempengaruhi citra sekolah di mata masyarakat. Masyarakat pasti tidak akan percaya pada sekolah dengan nilai akreditasi rendah. Akibatnya sekolah lambat laun akan mati karena kehilangan kepercayaan.

Mari kita bandingkan dengan sanksi yang diberikan Kemendikbud ketika melihat sekolah yang tidak jujur. Padahal kita tahu ketidakjujuran (*dishonesty*) saat Unas ibarat fenomena gunung es; kelihatan sedikit tetapi sejatinya sangat massif. Maka jangan heran jika masyarakat semakin menyangsikan kredibilitas hasil Unas.

Rasanya kini sudah saatnya kita memberikan kepercayaan pada guru untuk menilai hasil belajar anak-anak. Bukankah guru di setiap sekolah juga sudah terlatih menilai dalam bentuk ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penugasan, dan mengamati perilaku peserta didik. Dalam perspektif teori pendidikan, sistem evaluasi tersebut dinamakan penilaian otentik (*authentic assessment*).

Penilaian otentik meniscayakan guru menilai apa yang seharusnya dinilai, menilai dari banyak aspek, dan menilai dari berbagai sumber. Dari sudut pandang teori evaluasi, dapat dipastikan bahwa penilaian otentik jauh lebih kredibel dari hasil Unas. Karena itu pemerintah semestinya tidak membuat kebijakan setengah hati. Segera ganti Unas dengan penilaian otentik untuk pendidikan yang lebih bermartabat.

Urgensi Pendidikan Holistik

Setiap tanggal, 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tetapi sangat disayangkan, Hardiknas tahun 2013 harus dirayakan di tengah suasana karut-marut pelaksanaan Ujian Nasional (Unas). Unas yang semestinya dilaksanakan secara serentak harus ditunda untuk beberapa provinsi akibat mismanajemen. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Unas tahun 2013 yang terburuk. Pelaksanaan Unas juga masih diwarnai banyak ketidakjujuran (dishonesty) meskipun Kemendikbud telah menetapkan 20 paket soal.

Di samping persoalan Unas, pendidikan nasional juga diwarnai kontroversi pelaksanaan kurikulum 2013. Meski Kemendikbud telah memastikan pelaksanaan kurikulum dimulai secara bertahap pada tahun ajaran 2013/2014, penolakan terhadap kurikulum baru masih nyaring terdengar. Itu karena kurikulum 2013 sebagai pengganti kurikulum 2006 atau yang biasa disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) kelihatan tidak dipersiapkan secara matang.

Penelitian tentang kebutuhan kurikulum baru juga belum dilaksanakan secara serius. Apalagi sekolah sasaran dan guru pelaksana ternyata belum memahami secara seksama konten dan aplikasi kurikulum baru. Dari sinilah kesan bahwa kurikulum baru ini cenderung dipaksakan sulit dihindari. Berkaitan dengan beberapa persoalan tersebut rasanya semua komponen bangsa harus kembali menelaah amanah konstitusi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Menurut UU Sisdiknas, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Pengertian tersebut memberikan gambaran betapa pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi anak.

Itu berarti tugas guru adalah memfasilitasi anak agar mengenali potensi dirinya. Harus diakui bahwa tugas mendampingi anak agar mengenali potensi diri sering dilupakan guru. Orang tua bahkan terkadang kurang memperhatikan potensi anaknya. Padahal guru dan orang tua seharusnya bersinergi untuk mengembangkan potensi anak agar meraih kesuksesan dalam kehidupan pada masa mendatang.

Guru dan orang tua harus meyakini bahwa setiap anak memiliki potensi istimewa yang dianugerahkan Tuhan. Karena itu, tidak boleh ada kategori anak "bodoh" atau "nakal". Setiap anak memiliki kecerdasan yang sangat unik dan bervariasi. Pada konteks inilah orang tua, guru, dan peserta didik harus berkomunikasi secara timbal balik agar dapat menemukan potensi yang akan dikembangkan.

Yang penting diingat bahwa dalam dunia pendidikan potensi itu tidak harus bersifat akademik, tapi juga nonakademik. Menurut taksonomi Bloom (1968), pendidikan harus berorientasi pada tiga ranah yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara jujur harus diakui bahwa budaya masyarakat masih menempatkan capaian akademik di atas prestasi nonakademik.

Pemerintah juga turut menyuburkan pola pikir tersebut sebagaimana yang tampak dalam kebijakan Unas. Untuk kepentingan menyukseskan Unas, perhatian pemerintah luar biasa. Untuk membuat pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil Unas

berperilaku jujur saja, pemerintah harus mengerahkan sumber daya sipil dan militer. Karena itu, tidak mengherankan jika pemerintah mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk pelaksanaan Unas.

Dalam perspektif pendidikan, Unas jelas merepresentasikan keinginan mengukur capaian akademik dan mengabaikan prestasi nonakademik. Kebijakan ini terasa kurang bersahabat pada anak yang memiliki bakat luar biasa di bidang nonakademik. Rasanya sudah saatnya kebijakan pemerintah diarahkan untuk memberikan penghargaan yang lebih proporsional terhadap prestasi nonakademik.

Kita harus menyadari bahwa capaian akademik dan nonakademik itu sama-sama dibutuhkan untuk sukses hidup. Itu berarti profesi sebagai ilmuwan sama terhormatnya dengan atlet, pekerja seni, dan entrepreneur. Karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa Habibie (ilmuwan), Rudi Hartono (atlet), Emha Ainun Najib (budayawan), dan Ciputra (pengusaha dan pengembang virus entrepreneur) merupakan representasi orang-orang yang hebat di bidangnya.

Tidak bisa dikatakan bahwa salah satu lebih baik dari yang lain. Yang dibutuhkan justru saling bersinergi untuk membangun bangsa sehingga menjadi unggul dan bermartabat. Persoalan politik yang mengakibatkan sistem pendidikan terbelah menjadi dua atap; Kemendikbud dan Kemenag, juga harus dicarikan solusi. Penerapan sistem pendidikan dua atap selain mengakibatkan ketimpangan mutu, juga menjadikan perbedaan ilmu umum dan ilmu agama kian langgeng.

Polarisasi ini pasti menyebabkan pola pikir yang parsial (separated). Akibatnya tidak ada budaya untuk saling bertegur sapa antardisiplin ilmu. Jika kebijakan ini terus dipertahankan, keinginan untuk mengembangkan kajian yang bersifat holistik dan interkoneksi (holistic and interconnected studies) pasti tidak terwujud.

Sudah seharusnya pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenag saling bertegur sapa untuk merumuskan formula agar sistem pendidikan nasional tidak terpolarisasi menjadi dua atap. Pemerintah harus didorong untuk mewujudkan pendidikan holistik (holistic education). Pendidikan holistik dalam hal ini dapat dipahami sebagai pendidikan yang menggabungkan semua potensi manusia; intelektual, emosional, spiritual, sosial, kultural, dan fisikal.

Mengutip pendapat tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, pendidikan dikatakan sebagai daya upaya untuk

mengembangkan budi pekerti (kekuatan batin, hati), pikiran (otak, intellect), dan tubuh anak (raga). Bagian-bagian ini, menurut Ki Hajar, tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak. Pikiran Ki Hajar ini sangat relevan dengan tantangan dunia pendidikan.

Apalagi pendidikan nasional kini sedang dihadapkan pada persoalan serius berupa tawuran antar pelajar, human trafficking, ketidakjujuran saat ujian, dan kurang berkarakter. Pada konteks inilah seluruh stakeholders pendidikan seharusnya bersinergi untuk mengembangkan pendidikan holistik. Melalui pendidikan holistik, kita berharap akan terwujud pendidikan manusia seutuhnya (human wholeness). Semoga peringatan Hardiknas semakin membuka mata kita terhadap pentingnya pendidikan holistik.

Delapan Prinsip Pendidikan Holistik

Pendidikan holistik (*holistic education*) dapat dipahami sebagai pendidikan yang menggabungkan semua potensi; spiritual, intelektual, emosional, sosial, kultural, dan fisik. Konsep ini layak direnungkan terkait dengan beberapa peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di dunia pendidikan. Kasus tawuran antar pelajar, demonstrasi anarkistis mahasiswa, dan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang melibatkan kalangan terdidik, benar-benar telah menjadi potret buram pendidikan nasional.

Pertanyaannya, apa yang salah dari sistem pendidikan kita sehingga belum berhasil melahirkan generasi yang berakhlak, cerdas, dan berbudaya (*civilized*). Dalam bahasa konstitusi, sistem pendidikan kita dapat dikatakan telah gagal mendidik manusia seutuhnya. Pada konteks inilah penting diwujudkan sistem pendidikan holistik. Menurut Lucila T. Rudge dari The Ohio State University, pendidikan holistik itu ditegakkan di atas delapan prinsip.

Pertama, spirituality is central of holistic education. Prinsip ini menekankan betapa penting nilai-nilai spiritual-keagamaan dijadikan komponen utama dalam mewujudkan pendidikan holistik. Yang dibutuhkan dalam hal ini tentu saja budaya hidup religius di lingkungan sekolah. Prinsip pertama ini juga menekankan pentingnya keteladan dari pendidik dan orang tua sebagai asas mendidik anak sehingga berakhlak mulia.

Kedua, educating for earth literacy. Prinsip ini memberikan penekanan bahwa pendidikan seharusnya mampu mengubah pandangan anak-anak terhadap kehidupan di dunia. Harus ditekankan bahwa kehidupan ini adalah suci. Karena itu anak-anak harus dididik agar senang membaca sehingga tercerahkan dan selalu muncul rasa ingin tahu. Dalam bahasa warga persyarikatan, pendidikan seharusnya diorientasikan untuk mencerahkan masyarakat.

Ketiga, interconnectedness. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan seharusnya bersifat integral atau interkoneksi. Pendidikan seharusnya mengintegrasikan potensi akal (*brain*), indera (*sense*), dan hati (*heart*). Dalam perspektif inilah dikotomi ilmu umum dan agama harus diakhiri. Juga tidak boleh ada pandangan yang menyatakan bahwa disiplin ilmu tertentu memiliki kualifikasi lebih tinggi dibanding yang lain. Dunia ini membutuhkan sikap kerendah-hatian dari ilmuwan dengan berbagai latar belakang untuk saling bertegur sapa. Sikap ini penting untuk menghindari perspektif yang parsial terhadap suatu persoalan.

Keempat, educating for human development: human wholness. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan seharusnya mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik sehingga menjadi manusia seutuhnya. Untuk menjadi manusia seutuhnya jelas dibutuhkan seperangkat keterampilan di bidang intelektual, emosional, afeksi, fisik, sosial, estetik, dan spiritual. Dengan bermodal berbagai keterampilan ini maka dipastikan peserta didik akan sukses dalam mengarungi kehidupan.

Kelima, honoring students as individuals: individual uniqueness. Prinsip ini mengajarkan agar setiap pendidik menghargai peserta didik sebagai pribadi yang unik. Setiap orang yang lahir di dunia ini pasti dianugerahi potensi oleh Sang Pencipta sebagai bekal hidup. Karena itu seharusnya tidak ada lagi pendidik yang menvonis anak dengan label “anak nakal” atau “anak bodoh”. Semua anak harus

dipandang sebagai mutiara dengan potensi bawaan yang berbeda-beda. Tugas pendidik adalah memfasilitasi anak-anak agar menyadari potensi itu dan mengembangkannya sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa.

Keenam, caring relation. Prinsip ini mengajarkan pentingnya membangun hubungan yang baik antar sesama. Hubungan harmonis ini perlu dipraktikkan di lembaga pendidikan agar tidak ada jarak antar pribadi. Antara pemimpin yang dipimpin, pendidik-tenaga kependidikan, pendidik-peserta didik, dan orang tua, jelas memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu seharusnya tidak menjadi halangan terwujudnya hubungan timbal balik antar pribadi sehingga saling berempati.

Ketujuh, freedom of choice: new role of educators as facilitator. Prinsip ini mengharuskan pendidik sebagai fasilitator bagi peserta didik. Dengan berposisi sebagai fasilitator maka pasti ada perubahan dalam sistem pembelajaran. Jika dulu pembelajaran berpusat pada pendidik (*teacher center*), maka kini sudah berubah menjadi berpusat pada peserta didik (*student center*). Ini berarti pendidik tidak harus memosisikan diri sebagai satu-satunya sumber informasi. Peserta didik pun layak dijadikan sumber informasi. Model pembelajaran ini memungkinkan terjadinya saling tukar informasi (*information exchange*). Dengan demikian prinsip *every one is a teacher here* terasa sangat relevan dijalankan dalam proses pembelajaran.

Kedelapan, education for a participatory democracy. Prinsip terakhir ini memberikan pelajaran bahwa pendidikan seharusnya digunakan sebagai media untuk mendidik anak sehingga berbudaya demokratis. Sikap ini penting karena berkaitan dengan keterampilan sosial anak. Dalam kaitan ini anak-anak harus terus dilatih untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk.

Jika lembaga pendidikan Muhammadiyah mampu menerapkan delapan prinsip tersebut rasanya kita telah memberikan teladan pada pemerintah bagaimana seharusnya mengelola sistem pendidikan sehingga menghasilkan peserta didik yang berbudaya dan berakhlak mulia. Semoga kita bisa!

Spirit Internasional Tanpa RSBI

Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan yang "memakamkan" status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Bisa jadi keputusan ini meresahkan sekolah berstatus RSBI. Tetapi, jika dilihat alasan yang dikemukakan, putusan MK terasa sangat tepat. MK berpendapat bahwa status RSBI bertentangan dengan spirit UUD '45 yang mengamankan setiap warga negara berhak memperoleh layanan pendidikan terbaik.

MK pun membeberkan fakta bahwa mayoritas sekolah berstatus RSBI hanya menerima siswa dengan latar belakang ekonomi mampu. Akibatnya, terjadi kastanisasi pendidikan yang mewujud dalam kelas reguler dan RSBI.

MK juga menyoroti kecenderungan komersialisasi pendidikan yang ditandai dengan banyaknya pungutan. Bahkan, di kalangan masyarakat RSBI, hal itu dipelesetkan dengan rintisan sekolah "bertarif" internasional. Hanya tarifnya yang internasional, sementara mutunya lokal. Ini jelas sindiran terhadap mahalanya biaya pendidikan di sekolah berstatus RSBI.

Persoalan jati diri anak bangsa juga menjadi kekhawatiran karena kurikulum RSBI diadopsi dari pendidikan luar negeri. Apalagi, dalam pembelajaran, penggunaan bahasa Inggris ditekankan sebagai pengantar. Sementara itu, alokasi materi yang berkaitan dengan nilainilai keindonesiaan dirasa sangat kurang.

Putusan MK sekaligus mengakhiri perdebatan mengenai keberadaan sekolah berstatus RSBI. Sebab, pasca putusan MK, sekolah tidak boleh lagi menggunakan status RSBI. Yang menarik ditunggu adalah sikap Kemendikbud. Sejauh ini Kemendikbud masih berniat untuk melanjutkan program yang digulirkan sejak 2005 itu. Bahkan, penganggaran untuk mendukung program RSBI telah dialokasikan. Sebab, dalam perspektif Kemendikbud, program RSBI dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tingkat internasional. Program ini juga merupakan ikhtiar untuk menjalankan amanah konstitusi (UU Sisdiknas 20/2003, pasal 50 ayat 3).

Sejak Januari 2012 Kemendikbud sejatinya mengevaluasi 1.305 sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang berstatus RSBI. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa program RSBI dianggap gagal. Indikatornya, belum ada satu pun sekolah berstatus RSBI yang statusnya naik menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). Padahal, untuk menjadi SBI, jenjang SD hanya membutuhkan tiga tahun, SMP empat tahun, dan SMA/SMK lima tahun. Kegagalan itu menunjukkan bahwa program RSBI tidak dirancang dengan serius dan berkelanjutan. Padahal, program RSBI telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah dari APBN dan APBD.

Beberapa sekolah berstatus RSBI sejatinya telah lama menanyakan keberlanjutan program ini kepada pemerintah. Pertanyaan yang diajukan terutama berkaitan dengan perubahan status RSBI menjadi SBI. Karena tidak ada kepastian dari pemerintah, sebagian sekolah pun khawatir. Apalagi subsidi pemerintah mulai dikurangi.

Di tengah ketidakpastian itu, sekolah melakukan *fundraising* guna menutupi biaya operasional. Ironinya, ikhtiar sekolah ini dianggap tidak sejalan dengan program pemerintah mengenai pendidikan gratis. Sebab, pungutan tersebut dapat mereduksi kampanye pendidikan gratis yang selama ini digelorkan pemerintah. Faktanya, kampanye pendidikan gratis cenderung menyesatkan karena tidak pernah ada dalam kenyataan.

Karena MK telah mengumumkan putusan, Kemendikbud tidak memiliki pilihan lain. Program yang selama ini dirancang untuk mempertahankan RSBI harus dialihkan untuk kegiatan lain. Tetapi, Kemendikbud tidak boleh kehilangan semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apa pun namanya, semangat untuk menginternasionalisasikan mutu pendidikan tetap penting.

Pada konteks itulah, sekolah dapat menginisiasi program RSBI dengan menciptakan kelas-kelas unggulan. Rasanya tidak adil jika mengatasnamakan kesamaan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan kemudian menafikan anak-anak yang bertalenta hebat. Mereka yang bertalenta luar biasa jelas berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Pada mereka selayaknya kita berharap munculnya generasi emas yang akan menentukan perjalanan bangsa di masa mendatang.

Salah satu prinsip pendidikan holistik (*holistic education*) menekankan pentingnya perlakuan yang berbeda sesuai dengan keunikan anak. Proses pendidikan harus menghargai peserta didik sebagai pribadi yang unik (*honoring students as individuals, individual uniqueness*). Setiap orang yang lahir di dunia ini pasti dianugerahi potensi oleh Tuhan sebagai bekal hidup. Karena itu, seharusnya tidak ada lagi pendidik yang menvonis anak dengan status "anak nakal" atau "anak bodoh". Semua anak harus dipandang sebagai mutiara dengan potensi bawaan yang berbeda-beda.

Tugas pendidik adalah memfasilitasi anak-anak agar menyadari potensi itu dan mengembangkannya sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Dengan memahami prinsip dalam pendidikan holistik, jika ada perlakuan berbeda pada anak, tidak dapat digeneralisasi bahwa telah terjadi diskriminasi. Anak yang bertalenta hebat di bidang akademis harus difasilitasi sesuai dengan kebutuhannya. Demikian juga anak yang memiliki bakat di bidang nonakademis.

Untuk memberikan layanan terbaik, jelas dibutuhkan dana yang besar. Dalam konteks inilah, negara jika mau konsisten seharusnya menyediakan semua kebutuhan pendidikan anak. Tetapi, kita tahu persis, kemampuan negara sangat terbatas jika harus membiayai pendidikan yang bermutu untuk semua anak bangsa. Karena itulah, pemerintah membutuhkan *stakeholder* pendidikan dari kelompok swasta sehingga tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana dengan baik. Sinergi pemerintah dan swasta ini penting untuk mewujudkan kelas-kelas unggulan yang

mewadahi anak dengan berbagai bakat. Kelas-kelas unggulan inilah yang diharapkan dapat menggantikan program RSBI.

Untuk merealisasikan keinginan tersebut, yang dibutuhkan hanya *political will* dari pemerintah. Pemerintah harus memberikan kelonggaran kepada sekolah untuk memobilisasi sumber daya masyarakat. Ikhtiar ini jelas tidak termasuk kategori komersialisasi pendidikan sebagaimana diduga MK. Justru secara otomatis terjadi subsidi antara anak orang kaya dan miskin.

Gejala Inden Sekolah dan *Best Process*

Juni hingga Juli biasanya menjadi bulan yang sibuk bagi sekolah untuk menerima peserta didik. Tetapi, jika diamati, ada banyak sekolah tingkat dasar dan menengah yang telah membuka pendaftaran sejak jauh hari. Itu terutama dilakukan sekolah swasta berkategori unggulan dengan menggunakan sistem inden.

Langkah itu tentu tidak dapat disalahkan karena sekolah sejatinya hanya merespons keinginan masyarakat. Bahkan, sistem inden juga dilakukan sekolah berkategori non unggulan dengan tujuan agar tetap memperoleh peserta didik baru untuk menjamin keberlangsungan sekolahnya.

Ada sekolah yang laris manis sehingga pendaftarannya melampaui daya tampung. Bahkan, dengan gagah, sekolah tersebut menolak banyak pendaftar. Fenomena itu biasanya dialami sekolah berkategori mapan dengan segudang prestasi.

Sementara di tempat lain yang berjarak tidak terlalu jauh, ada sekolah yang harus berjuang hingga tetes keringat penghabisan

untuk mendapatkan peserta didik baru. Bahkan, hingga tahun ajaran baru dimulai, sekolah tersebut masih menerima pendaftaran. Kondisi itu biasanya dialami sekolah berkategori kecil dan miskin prestasi.

Perbedaan nasib sekolah itu terjadi karena faktor keunggulan. Itu berarti jika lembaga pendidikan berkategori unggul, di mana pun posisinya pasti akan dicari. Pada konteks itulah, lembaga pendidikan harus memberikan layanan yang bermutu. Jika tidak begitu, pasti sekolah akan ditinggalkan *stakeholder*-nya.

Sekolah unggul merupakan terjemahan dari beberapa istilah seperti *effective school*, *efficiency school*, *high performance school*, dan *excellent school*. Dalam praktiknya, untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang kemutuan sekolah biasanya digunakan *branding* sekolah unggul, sekolah juara, sekolah prestasi, sekolah plus, sekolah favorit, dan sekolah model.

Sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), label RSBI juga digunakan untuk menunjukkan keunggulan sekolah. Tentu saja, beberapa *branding* itu absah digunakan asalkan di sekolah tersebut diterapkan budaya mutu. Artinya, ada jaminan standar mutu layanan yang ditetapkan sekolah.

Persoalan layanan mutu itu penting karena ada kalanya orang memahami pendidikan unggul sekadar dilihat dari sarana fisik, besarnya SPP, dan muridnya yang memang pilihan. Akibatnya, muncul persepsi bahwa sekolah unggul itu harus serba “wah”.

Tom J. Parkins (2003) dalam penelitiannya tentang pendidikan unggul di Tanah Air menyatakan bahwa ada tiga indikator yang harus dimiliki sekolah unggul: *input*, proses, dan *output*. Menurutnya, sekolah unggul dapat dicapai melalui dua strategi, yaitu *best input* dan *best process*.

Strategi *best input* meniscayakan sekolah untuk memperoleh peserta didik yang bermutu. Dalam praktiknya, sekolah berkategori *best input* menerapkan tes masuk yang sangat ketat, terutama yang berkaitan dengan kemampuan akademik. Harapannya, sekolah memperoleh peserta didik yang terbaik. Dengan demikian, *output* yang dihasilkan sekolah pasti lulusan dengan capaian akademik luar biasa.

Pertanyaannya, capaian akademik yang luar biasa itu dikarenakan proses pendidikan di sekolah atau faktor lain? Diduga, anak-anak

hebat lulusan sekolah yang menekankan strategi *best input* itu karena anaknya memang hebat sejak semula. Fasilitas bimbingan belajar di luar sekolah juga sudah disiapkan begitu rupa oleh orang tua peserta didik. Itu berarti kontribusi guru dalam proses pendidikan pada sekolah yang menekankan *best input* sangat kecil.

Sekolah unggul kategori kedua menekankan strategi *best process*. Sekolah tersebut biasanya tidak begitu menekankan kepada kualitas akademik anak saat awal masuk. Dalam kondisi apa pun, peserta didik yang mendaftar akan diterima. Semua peserta didik yang mendaftar akan dipetakan berdasar keunggulannya. Jadi, tidak ada proses seleksi yang “jelimet” untuk sekolah tersebut karena setiap guru telah menyiapkan diri menjadi agen perubahan (*agent of change*) bagi peserta didik.

Setiap guru di sekolah berkategori *best process* juga menyadari betul ungkapan Edward Sallis dalam *Total Quality Management in Education* (2006), bahwa *recovery begins with teachers*. Karena ujung tombak pendidikan adalah guru, para guru di sekolah yang menekankan strategi *best process* berusaha secara maksimal mengubah karakter anak dari yang biasa menjadi luar biasa. Guru di sekolah tersebut meyakini bahwa setiap anak pasti telah memiliki keunggulan, minat, dan bakat yang unik sebagai anugerah dari Tuhan. Tugas guru ialah memfasilitasi anak agar memaksimalkan potensi bawaan tersebut.

Rasanya tipe sekolah berkategori *best process* itulah yang layak disebut pendidikan unggul. Tetapi, sayang, jumlah sekolah yang menekankan keunggulan pada *best process* ternyata sangat sedikit. Hasil penelitian Tom menunjukkan bahwa 99 persen sekolah unggul di Tanah Air membangun keunggulannya dengan strategi *best input*. Itu berarti hanya satu persen sekolah yang menekankan keunggulannya melalui strategi *best process*.

Tugas kita sebagai *stakeholder* pendidikan ialah mendorong sebanyak mungkin sekolah agar menempuh strategi *best process* dengan guru hebat. Itu penting ditekankan karena jantung pendidikan sejatinya ada pada proses pembelajaran dengan guru-guru yang andal.

Membangun Harapan Melalui Pendidikan

Mantan senator Amerika Serikat (AS) dan penggagas yayasan beasiswa Fulbright, William Fulbright, pernah berujar: *the education is slow movement, but powerful force*. Ungkapan ini bermakna bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang pergerakannya lambat, tetapi memiliki daya dobrak luar biasa kuat. Pernyataan Fulbright ini layak direnungkan karena kini ada begitu banyak harapan yang dialamatkan pada dunia pendidikan. Institusi pendidikan diharapkan dapat berkontribusi dalam penyelesaian berbagai soal bangsa.

Nalar itulah yang melandasi keinginan Kemendikbud untuk mengganti kurikulum. Pergantian kurikulum 2006 yang lebih dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), menjadi Kurikulum 2013 telah melewati masa uji publik. Berdasar hasil uji publik itulah Kemendikbud berkesempatan untuk merevisi naskah akademik kurikulum baru sehingga siap dilaksanakan mulai tahun ajaran 2013/2014.

Jika ditelisik lebih jauh memang banyak soal yang kini dihadapi bangsa. Sebagai contoh, sendi-sendi kehidupan berbangsa terus digerogeti virus korupsi sehingga negeri tercinta ini kian rapuh. Publik pun bertanya-tanya, apa sumbangsih lembaga pendidikan untuk mengatasi problem korupsi? Apalagi jika diamati, ternyata mereka yang terlibat kasus korupsi banyak yang berasal dari kalangan terpelajar. Bahkan sebagian mereka adalah lulusan pendidikan tinggi bergelar doktor dan profesor.

Pertanyaannya, apakah lembaga pendidikan turut memproduksi koruptor? Pada konteks inilah publik menganggap penting untuk memberikan materi pendidikan antikorupsi mulai tingkat taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Ironisnya bangsa ini ternyata tidak hanya menghadapi persoalan korupsi. Budaya kewargaan (*civic culture*) seperti keramah tamahan, toleran, dan berkeadaban yang selama ini menjadi identitas bangsa mulai tergerus seiring munculnya radikalisme di tengah-tengah masyarakat.

Publik pun mulai membandingkan era reformasi dengan masa lalu. Sebagian kemudian menyimpulkan bahwa budaya kewargaan terus tergerus karena kalangan terdidik tidak lagi memperoleh pendidikan Pancasila secara memadai. Tuntutan untuk memasukkan Pancasila dalam kurikulum pendidikan pun terus menguat. Nilai-nilai Pancasila perlu diajarkan untuk menggugah kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan kaum muda.

Yang penting diingat dalam kaitan ini, pembelajaran Pancasila harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih dialogis dan manusiawi. Ini dimaksudkan agar pendidikan mampu melahirkan generasi bangsa yang lebih berkarakter. Berbagai ironi yang terjadi di dunia pendidikan juga kian menjadi sehingga membutuhkan solusi.

Kasus ketakjujuran saat ujian, tawuran antarpelajar, demonstrasi anarkistis, narkoba, seks bebas, video mesum, *human trafficking*, dan tindakan asusila lain yang melibatkan kalangan terpelajar telah menyedot begitu banyak perhatian. Kasus yang membuat publik, termasuk guru dan orang tua, mengelus dada adalah arisan pekerja seks komersial (PSK) yang melibatkan pelajar SMA di Situbondo, Jatim. Yang lebih ironis, ternyata PSK yang dijadikan “piala bergilir” pelajar itu ternyata telah positif terkena virus HIV. Hati siapa yang tidak miris membaca berita tersebut.

Pertanyaannya, rentetan berita negatif inilah hasil pendidikan

yang telah menyedot anggaran negara hingga mencapai 20 persen? Untuk merespons kasus seks bebas yang melibatkan pelajar, sebagian elemen mengusulkan agar ada kurikulum pendidikan seks.

Ide ini jelas baik asal materi pendidikan seks tidak diberikan secara vulgar. Sebab, jika pembelajaran dilakukan secara vulgar, yang terjadi adalah dorongan yang semakin kuat untuk mengetahui lebih jauh atau bahkan ingin mencobanya. Melalui kurikulum pendidikan seks, pelajar diharapkan memperoleh informasi dari sumber yang benar sehingga terhindar dari praktik seks bebas. Di samping itu, anak-anak juga dapat menjaga kesehatan reproduksinya.

Sebagai institusi yang diharapkan begitu banyak elemen, praktisi pendidikan harus menemukan strategi yang tepat untuk mengajarkan materi yang menjadi tuntutan publik. Paling tidak ada dua strategi yang dapat dilakukan. *Pertama*, menyiapkan kurikulum sesuai dengan materi yang dikehendaki. Jika ini yang menjadi pilihan, dapat dibayangkan betapa gemuk struktur kurikulum dalam satuan pendidikan.

Kedua, melalui strategi penyisipan (*inserting*) materi pendidikan. Strategi penyisipan materi ini terasa paling memungkinkan. Melalui strategi *inserting* penyampaian materi pendidikan sesuai dengan topik yang akan diajarkan dapat dilakukan lebih fleksibel. Itu berarti tidak harus ada mata pelajaran baru. Strategi kedua ini juga terasa sejalan dengan semangat yang dikembangkan Kemendikbud. Dalam kurikulum 2013, Kemendikbud menekankan adanya perampingan kurikulum sehingga ada beberapa mata pelajaran yang harus diintegrasikan.

Pendidik dan pemerhati pendidikan tetap dapat berkreasi untuk menyusun sebanyak mungkin modul berkaitan dengan pendidikan antikorupsi, lingkungan hidup, *civic culture*, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, serta pencegahan virus HIV/AIDS. Selanjutnya, modul ini dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. Yang perlu diingat, pendidikan berbagai materi yang dibutuhkan bangsa ini tidak boleh sekadar transfer pengetahuan. Yang jauh lebih penting dari sistem pendidikan adalah menumbuhkan afeksi anak sehingga mewujudkan dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Selain melalui mata pelajaran, sesungguhnya ada satu variabel yang terasa hilang dari proses pendidikan kita, yaitu keteladanan. Berbagai ironi yang terjadi di dunia pendidikan salah satu faktornya

sangat mungkin disebabkan tiadanya keteladanan. Keteladanan mutlak dibutuhkan untuk membentuk pribadi anak sehingga berintegritas dan berakhlak mulia. Pada konteks inilah setiap orang yang memiliki keprihatinan terhadap nasib generasi mendatang wajib menghadirkan keteladanan di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar.

Selamatkan Buah Hati Kita

Bagi orang tua, anak merupakan anugerah yang tak terhingga nilainya. Anak juga merupakan amanah Allah SWT. Dalam Alqur'an, anak juga dilukiskan sebagai penyejuk pandangan (QS. Al-Furqan: 74) dan hiasan hidup di dunia (QS. Al-Kahfi: 46). Tetapi jangan lupa, anak juga digambarkan secara antagonis, misalnya sebagai musuh (QS. Al-Taghabun: 14) dan fitnah atau cobaan (QS. Al-Taghabun: 15).

Dengan gambaran itu berarti orang tua harus menjaga buah hatinya dengan penuh kasih sayang. Selain orang tua, guru juga harus menjaga anak didiknya dengan sepenuh hati. Itu karena sebagian waktu anak dihabiskan di sekolah. Bahkan saat anak berada di sekolah, guru harus memosisikan diri sebagai orang tua sekaligus sahabat.

Peringatan bagi orang tua dan guru itu penting dikemukakan karena kasus kekerasan (*bullying*) pada anak kini kian mengkhawatirkan. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada Januari-Juni 2013, menunjukkan bahwa telah

terjadi 1.032 kasus kekerasan anak. Rinciannya, 294 kasus kekerasan fisik (28 persen), 203 kasus kekerasan psikis (20 persen), dan 535 kasus kekerasan seksual (52 persen).

Diantara kasus kekerasan anak yang menyita perhatian publik pada Oktober 2014 adalah peristiwa di SD Trisula Perwari Bukittinggi, Sumatera Barat. Publik pun dapat mengunggah kasus kekerasan yang melibatkan beberapa anak SD di Bukittinggi itu melalui tayangan video *You Tube*. Data Komnas PA juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak menduduki peringkat nomor wahid. Karena itu tidak mengherankan jika kasus *bullying* pada anak kini menjadi perhatian nasional.

Salah satu kasus yang kemudian menjadi perhatian nasional dan internasional adalah kekerasan seksual yang menimpa anak-anak TK Jakarta International School (JIS). Terkuaknya kejadian di JIS ternyata memicu keberanian masyarakat untuk mengungkap kasus-kasus pelecehan seksual pada anak di daerah lain. Menurut catatan Mabes Polri, hingga pertengahan 2014 telah terjadi 73 kasus pelecehan seksual pada anak (*pedofilia*) yang tersebar di 18 Provinsi.

Dari semua kasus pedofelia tersebut yang paling heboh adalah pelecehan seksual terhadap anak di Sukabumi dengan pelaku Andri Sobari alias Emon. Tidak tanggung-tanggung, korban Emon diduga mencapai 120 anak. Konon Aksi Emon sudah berlangsung sejak tahun 2005. Rangkaian kasus kekerasan seksual pada anak, apalagi dilakukan di sekolah, jelas menjadi ironi dalam dunia pendidikan.

Di kota metropolis ini beberapa kali juga terjadi kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) yang melibatkan pelajar setingkat SMP dan SMA. Ironisnya, diantara mereka ada yang bertindak sebagai mucikari. Coba bayangkan, orang tua mana yang tidak risau dengan kasus tersebut. Pada usia yang masih sangat belia itu, anak-anak yang semestinya belajar untuk menyiapkan masa depan ternyata sudah jauh terlibat dalam jaringan prostitusi.

Apalagi dalam beberapa kasus *human trafficking* itu anak-anak ternyata bukan sekedar korban, melainkan berprofesi sebagai mucikari muda. Mereka pun tampak sangat rapi dan profesional menjalankan bisnis prostitusi. Mereka seakan tidak segan menjadikan teman-temannya sebagai korban. Media pun menamakan pelaku bisnis prostitusi yang melibatkan pelajar dengan istilah *blue chicken* (ayam berbaju biru, anak SMP) dan *gray chicken* (ayam berbaju abu-

abu, anak SMA).

Kasus yang lain yang berulang kali terjadi adalah seks bebas dan video mesum yang melibatkan pelajar. Bahkan pada penghujung 2012, dunia pendidikan dikagetkan kasus arisan pekerja seks komersial (PSK) yang melibatkan sejumlah pelajar SMA di Situbondo, Jatim. Ironisnya, PSK yang dijadikan “piala bergilir” ternyata telah positif terjangkit virus HIV/AIDS. Sekali lagi, hati orang tua dan guru mana yang tidak miris membaca rentetan berita tersebut.

Untuk meminimalkan kasus kekerasan seksual dan asusila yang melibatkan pelajar, sebagian pemerhati pendidikan mengusulkan agar ada materi pendidikan seks (*sex education*). Tetapi gagasan ini terlanjur menuai kontroversi. Mereka yang menolak menganggap pendidikan seks itu tabu sehingga akan berdampak negatif. Sementara mereka yang setuju menganggap pendidikan seks penting untuk menghindarkan anak dari praktek seks bebas. Pendidikan seks juga bermanfaat bagi anak agar dapat menjaga kesehatan reproduksinya.

Terlepas dari pro kontra tersebut, yang mendesak dilakukan adalah menyelamatkan anak-anak dari kekerasan seksual dan kasus asusila lainnya. Disinilah peran orang tua dan guru terasa sangat penting untuk mendidik anak-anak. Rasanya, lebih baik anak-anak memperoleh pengetahuan mengenai seluk beluk seks dan kesehatan reproduksi dari sumber yang benar, yakni guru dan orang tua, daripada mereka mencari sendiri melalui media *online* (website).

Jika anak-anak bebas mengakses media *online* tanpa pendampingan dari orang tua dan guru maka ibaratnya mereka sedang memasuki hutan belantara. Semua layanan tersedia mulai film, game, dan berbagai jenis informasi lainnya begitu bebas diakses. Untuk itulah anak-anak harus mendapatkan bimbingan dari orang tua dan guru saat berinteraksi dengan internet. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat memilih informasi yang bermanfaat untuk kehidupannya.

Dalam proses pendampingan itu, anak-anak harus didekatkan dengan realitas kehidupan. Anak-anak harus diberikan pemahaman terhadap akibat yang ditimbulkan jika mengakses tayangan atau informasi yang tidak baik dari media. Rasanya anak-anak masa kini tidak bisa lagi dilarang. Pendekatan pendidikan dengan menggunakan kata “jangan” kini harus ditinggalkan. Karena jika dilarang, rasa ingin tahu anak-anak pasti semakin membuncah.

Disamping melalui pembelajaran, yang juga penting ditekankan

pada anak-anak adalah pembiasaan. Melalui metode pembiasaan inilah anak-anak diharapkan berbudaya baik dalam keseharian. Di atas itu semua, yang terpenting dalam pendidikan tentu saja adalah keteladanan. Melalui keteladanan orang tua, guru, dan masyarakat, kita berharap anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia.

Spirit Multikulturalisme Piala Dunia

Gebyar Piala Dunia edisi ke-20 resmi dimulai. Hajatan akbar empat tahunan ini berlangsung di Brasil mulai 12 Juni hingga 13 Juli 2014. Sebanyak 32 kontestan mewakili negara masing-masing akan unjuk kekuatan untuk menjadi yang terbaik. Karena mewakili negara maka sepak bola sekaligus menjadi media untuk menumbuhkan spirit nasionalisme.

Pada konteks inilah nilai-nilai persatuan, perjuangan, pengorbanan, kehormatan, dan harga diri, sebagai satu bangsa dipertaruhkan. Nilai-nilai nasionalisme itu menjadi penyemangat setiap pemain sehingga berlaga dengan sepenuh hati guna meraih kemenangan demi menjaga martabat bangsanya. Selain menumbuhkan spirit nasionalisme, sepak bola juga memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya multikulturalisme.

Melalui permainan sepak bola, setiap pemain dengan berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama, dipertemukan menjadi satu kekuatan. Bahkan, di era modern ini berkembang budaya naturalisasi pemain-pemain berkualitas dari mancanegara. Seakan

tidak mau ketinggalan, PSSI juga menaturalisasi sejumlah pemain demi meraih mimpi menjadi peserta Piala Dunia pada suatu waktu nanti.

Perbedaan agama antarpemain tidak menjadi halangan untuk membangun tim yang tangguh. Tengoklah tim nasional Prancis yang dihuni beberapa pemain muslim, seperti Karim Benzema dan Franck Ribery. Pemain berkulit hitam yang sering menjadi sasaran rasisme juga dapat bermain dalam satu tim seperti Mario Balotelli (Italia) dan Jerome Boateng (Jerman).

Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sepak bola dapat menjadi media yang efektif untuk menciptakan pembauran antarwarga (*melting pot*). Slogan resmi Piala Dunia 2014, All in One Rhythm, terasa sangat relevan untuk dijadikan spirit menumbuhkan multikulturalisme. Slogan tersebut seakan mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk mewujudkan harmoni dalam kehidupan yang plural.

Demikian juga dengan lagu resmi Piala Dunia, *We Are One*, yang dinyanyikan duet penyanyi Pitbull, Jennifer Lopez (J-Lo), dan Claudia Leitte. Spirit *We Are One* mengiringi pembukaan Piala Dunia sekaligus laga perdana yang mempertemukan Brasil melawan Kroasia. Lagu resmi Piala Dunia menegaskan pentingnya semangat mewujudkan kehidupan berbangsa yang ramah dengan keragaman.

Multikulturalisme dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap pluralitas budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar kelompok minoritas terintegrasi dalam masyarakat dan kelompok mayoritas mau mengakomodasi perbedaan kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka tetap diakui (Kymlika, 1989).

Dengan demikian, tujuan utama multikulturalisme adalah untuk menciptakan, menjamin, dan mendorong ruang publik (*public sphere*) sehingga memungkinkan beragam komunitas dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhasan masing-masing. Menurut Haryatmoko (2007), setidaknya ada tiga alasan yang menjadikan multikulturalisme mutlak diperlukan dalam konteks kekinian.

Pertama, adanya fenomena penindasan atau penafian atas dasar agama, etnis, dan budaya. Dikotomi antara "kita" (kelompok dominan) dan "mereka" (di luar kelompok dominan) sering kali dilembagakan dalam rangka menjauhkan kelompok minoritas dari kekuasaan. Pelembagaan diskriminasi ini banyak terjadi di wilayah

publik seperti pekerjaan, pendidikan, jabatan publik, dan hubungan sosial lainnya. Agar diskriminasi ini memperoleh legitimasi, kelompok minoritas terus ditekan sehingga kehilangan eksistensi.

Kedua, istilah minoritas secara sistematis telah digunakan untuk memarjinalkan kelompok tertentu dengan memberi label "tidak terlalu penting" dalam berhubungan dengan kelompok dominan. Akibatnya, perasaan rendah diri semakin terpatni dalam struktur kesadaran kelompok minoritas. Pada konteks inilah, multikulturalisme hendak menjawab kebutuhan yang mendasar kelompok minoritas untuk mengembangkan identitas budaya dan memberikan penghargaan terhadap eksistensinya.

Ketiga, kaum urban dan migran sering kali menjadi pihak yang dipinggirkan oleh kelompok dominan. Situasi ini semakin terasa sejak undang-undang otonomi daerah dilaksanakan. Apalagi dalam banyak kasus, otonomi daerah sering kali disalahartikan dengan pemihakan terhadap kepentingan warga asli atau pribumi.

Akibatnya, terjadi diskriminasi terhadap warga pendatang. Lebih ironis lagi, rekrutmen pejabat publik sering kali tidak didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak, tetapi asal daerah dan pertimbangan politik lokal dan faktor primordialisme lainnya. Berdasarkan tiga argumen tersebut, kesadaran multikulturalisme perlu terus digelorakan agar tumbuh sikap saling memahami kekhasan masing-masing.

Dalam hal ini, kekhasan tidak boleh disamakan dengan keunggulan. Cara berpikir ini penting dikedepankan dalam memahami keragaman latar belakang sosial budaya. Dalam memahami kekhasan etnis, budaya, dan agama, kita layak belajar pada teori filsuf Prancis, Emmanuel Levinas (1971) tentang penampakan wajah.

Dikatakan oleh Levinas bahwa penampakan wajah bukan bagian dari aku, bukan pula diukur dari tolok ukurku. Yang lain itu sama sekali berbeda dari aku. Namun demikian, hubungan aku dengan yang lain tidak akan melahirkan kekerasan. Bahkan, kehadiran yang lain justru akan membuahkan kedamaian dan menumbuhkan kultur positif dalam kehidupan.

Melalui teori penampakan wajah akan tergambar yang lain (*the other*). Penampakan wajah yang lain akan memungkinkan orang saling bertegur sapa serta mengundang simpati, empati, dan kekaguman. Penampakan wajah tidak pernah membiarkan orang

lepas dari tanggung jawab. Setiap orang akan dihadapkan pada penampakan wajah yang mengusik sehingga harus bersikap.

Wajah yang menampak dalam gambar mencair dalam afeksi sehingga tidak hanya berhenti pada persepsi, tetapi juga mengkristal dalam kesadaran seseorang. Teori Levinas mengajarkan bahwa perjumpaan dengan wajah yang lain merupakan bentuk hubungan yang ditandai kepedulian dan nir kepentingan. Hubungan ini menyebabkan seseorang bertanggung jawab terhadap yang lain tanpa menuntut imbalan. Itu berarti tidak ada tuntutan timbal balik dan tiada pula dominasi.

Pelajaran multikulturalisme terasa sekali dalam permainan sepak bola. Semua pemain bahu-membahu dan saling membantu sehingga tidak tampak budaya yang mendominasi. Penonton juga dapat menikmati pertandingan dan memberikan dukungan penuh pada pemain; meski sejujurnya harus diakui bahwa antara pemain dan penonton sejatinya memiliki perbedaan sosial budaya.

Hal itu menunjukkan betapa penting permainan sepak bola sebagai media untuk menumbuhkan kesadaran multikulturalisme. Semoga semarak Piala Dunia dapat dijadikan pelajaran untuk membangun Indonesia yang lebih ramah terhadap keragaman.

Harapan untuk Kementerian Ristek dan Dikti

Salah satu perubahan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) adalah membagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi dua. Pertama, Kementerian Bidang Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Kedua, Kementerian Bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Dikti). Perubahan itu bertujuan meningkatkan kinerja kementerian yang sangat menentukan nasib pendidikan nasional.

Harus diakui, selama ini *loading* kegiatan Kemendikbud sangat berjubel. Anggaran yang disiapkan pun sangat besar. Sebagai gambaran, anggaran Kemendikbud mencapai Rp 371,2 triliun dari total APBN 2014 yang mencapai Rp 1.816,7 triliun. Besarnya anggaran tersebut digunakan untuk mengurus pendidikan, mulai anak usia dini, taman kanak-kanak, dikdasmen, hingga dikti. Itu belum termasuk berbagai bentuk pendidikan informal dan nonformal.

Karena yang diurus sangat banyak, arah pendidikan nasional sejauh ini terkesan kurang fokus. Dampaknya, mutu pendidikan nasional tertinggal dari negara lain. Ranking pendidikan nasional level dunia juga terceder di bawah. Padahal, pada 2015, kita memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jelas dibutuhkan keseriusan untuk mengelola pendidikan agar lulusan berdaya saing internasional.

Dalam kaitan itulah, perubahan kementerian pendidikan nasional terasa sangat relevan. Pembentukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Dikti yang terpisah dari Dikdasmen bisa mendorong kiprah perguruan tinggi (PT) dalam melaksanakan tugas-tugas penelitian. Apalagi jika penelitian itu menghasilkan teknologi tepat guna yang bermanfaat praktis bagi kehidupan masyarakat.

Seorang akademisi Melbourne University, Profesor Richard James (2010), pernah membuat definisi menarik tentang penelitian. Menurut dia, substansi penelitian terletak pada publikasi dan kegunaan (*research is publication and using*). Pandangan itu menegaskan, untuk mengukur mutu penelitian, harus dilihat publikasi yang dihasilkan dan manfaat praktisnya bagi masyarakat.

Melalui publikasi, akan terjalin komunikasi timbal balik antarilmuwan. Bermula dari publikasi itulah keinginan membangun budaya akademik (*academic atmosphere*) di dunia pendidikan dapat tercapai. Publikasi hasil penelitian juga berguna untuk meminimalkan praktik plagiat yang marak terjadi di dunia pendidikan. Berkaitan dengan problem plagiat, perguruan tinggi (PT) harus memiliki mekanisme yang ampuh.

Salah satu caranya adalah memublikasikan ringkasan hasil penelitian melalui media cetak nasional atau internasional. Apalagi kini publikasi ilmiah juga dapat dilakukan secara online. Sayangnya, banyak peneliti yang belum berani memublikasikan hasil penelitian mereka. Padahal, selalu dikatakan, tugas utama civitas academica PT adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tiga tugas itulah yang populer disebut tridarma PT. Itu berarti seluruh civitas academica harus memahami tridarma sebagai satu kesatuan yang saling terkait (*linkage*). Berkaitan dengan keinginan untuk membuat linkage tridarma, civitas academica harus menyadari bahwa penelitian tersebut sangat penting.

Hasil penelitian bisa menjadi referensi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian masyarakat. Kesadaran itu terasa kurang di kalangan civitas academica. Dampaknya, praktik

pendidikan dan pengabdian tidak mengalami kemajuan berarti. Padahal, dunia pendidikan telah berkembang begitu pesat. Kebutuhan masyarakat juga bergerak begitu cepat seiring dengan tuntutan zaman. Konteks pendidikan terkini jelas meniscayakan pembelajaran berbasis penelitian.

Karena itu, banyak PT yang menjadikan penelitian sebagai branding (label). Tidak mengherankan jika ada universitas yang mengenalkan diri dengan label *university based research*. Untuk menjadikan penelitian sebagai budaya, setiap dosen harus mendesain pembelajaran dengan mengutamakan model induktif. Model pembelajaran induktif mengharuskan mahasiswa mengamati problem sosial di tengah-tengah masyarakat untuk dicarikan solusinya. Itulah sesungguhnya model pembelajaran otentik (*authentic learning*).

Inti pembelajaran otentik adalah pelibatan mahasiswa secara aktif untuk menemukan beragam ilmu pengetahuan dengan bersumber pada pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Metode induktif dapat menjadi alternatif untuk menggantikan pembelajaran deduktif. Sudah saatnya mahasiswa dilatih untuk memiliki sense bertanya, mengobservasi, dan mengajukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Pola pembelajaran itu bisa menjadi media membentuk mahasiswa haus ilmu sehingga selalu merasa ingin tahu (*curiosity*).

Melalui cara itu, berarti dosen telah memberikan soft skill kepada mahasiswa untuk menjadi calon peneliti pada masa mendatang. Karena itu, penting ditekankan pelibatan mahasiswa dalam penelitian oleh dosen. Dalam sudut pandang penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), komponen penelitian yang melibatkan mahasiswa bernilai sangat tinggi. Demikian pula penelitian yang diikuti publikasi. Dua kegiatan tersebut, penelitian dan publikasi, memberikan kontribusi yang sangat besar dalam akreditasi program studi dan institusi.

Untuk membangun budaya penelitian dan publikasi, direktur jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud sejatinya telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 152/E/T/2012 tentang kewajiban melakukan publikasi ilmiah bagi mahasiswa S-1, S-2, dan S-3. Sayang sekali, terobosan Dirjen Dikti itu belum efektif. Masih banyak PT yang enggan menjalankan amanat peraturan tersebut.

Memuliakan Profesi Guru

Hampir setiap tahun pemerintah disibukkan dengan urusan penentuan upah minimum provinsi (UMP). Problem yang dihadapi pun selalu sama, yakni penentuan besaran UMP untuk merespon tuntutan buruh. Seiring dengan alotnya penentuan UMP buruh, ada pertanyaan yang mesti dijawab, yaitu berkaitan dengan nasib guru. Pertanyaannya, berapa gaji minimal yang seharusnya diberikan pada guru agar hidup dengan layak?

Pertanyaan tersebut penting dijawab karena sejauh ini gaji guru masih jauh dari kata memadai. Padahal kalau kita ingin memperbaiki mutu pendidikan, salah satu yang harus dipikirkan adalah nasib guru. Pemerintah dan swasta harus memastikan bahwa guru-guru kita hidup secara layak dan terhormat. Tetapi itulah hebatnya para pahlawan tanpa tanda jasa. Meski bergaji kecil, mereka tetap mendidik dengan sepenuh hati.

Semangat mengabdikan diri para guru muncul karena ada keyakinan bahwa mendidik tidak sekedar bekerja, melainkan juga beribadah. Dengan kata lain, mendidik bukan sekedar profesi, melainkan

panggilan hati. Karena itu dalam perspektif perundang-undangan, posisi guru tidak sama dengan buruh. Guru merupakan jabatan profesi sehingga tidak dapat dijalani sembarang orang. Seseorang yang ingin berprofesi sebagai guru disyaratkan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial (*UU Nomor 14 Tahun 2005*).

Untuk menjadi guru, seseorang tidak boleh hanya bermodal kemauan dan kepintaran. Guru dituntut untuk menampilkan diri seutuhnya sebagai pendidik. Tutur kata dan perilaku guru harus benar-benar dapat digugu dan ditiru. Pada konteks inilah guru harus menghadirkan keteladan bagi anak-anak. Tegasnya, guru harus menjadi teladan kehidupan (*living example*) bagi peserta didiknya.

Untuk menjadi pendidik profesional, guru juga harus mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). PPG harus dijalani calon guru selama satu tahun di perguruan tinggi yang telah ditunjuk pemerintah. Itu berarti seseorang dapat dinyatakan sebagai guru profesional jika lulus PPG. Mereka yang lulus PPG berhak untuk memperoleh gelar Guru atau disingkat “Gr” (*Pasal 14, Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013*).

Berbeda dengan buruh, guru bekerja di lembaga pendidikan yang bersifat nirlaba. Sementara buruh bekerja di perusahaan yang berorientasi profit. Karena itulah nafas perjuangan guru terasa lebih menonjol. Tetapi sebagai orang yang bekerja dalam waktu tertentu, guru berhak untuk menerima gaji dan tunjangan yang layak. Berkaitan dengan itulah, kesejahteraan hidup guru harus terjamin.

Untuk itu guru kita tidak boleh menderita. Itu karena mereka memiliki tugas mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena gajinya belum memadai maka *stakeholders* pendidikan harus berpikir keras agar kehidupan guru tidak terganggu. Apalagi realitas menunjukkan masih banyak guru yang menerima gaji jauh di bawah standar. Bahkan jika dibanding dengan UMP buruh yang ditetapkan pemerintah, terasa sekali gaji guru jauh lebih kecil.

Padahal jika dibanding buruh, profesi guru menuntut persyaratan pendidikan minimal sarjana (S-1 atau D-IV). Bahkan kini banyak guru yang berijazah S-2 dan S-3. Selain persyaratan akademik, guru juga harus mengalami jalan berliku. Misalnya, guru yang diterima di lembaga pendidikan swasta tidak otomatis berstatus guru tetap. Mereka harus melewati masa percobaan hingga bertahun-tahun. Pengelola pendidikan swasta biasanya sangat berhati-hati mengangkat

guru tetap. Itu karena ada konsekwensi membayar gaji pokok dan tunjangan.

Jika gaji guru masih di bawah standar, bagaimana mereka dapat menjalankan tugas dengan profesional dan penuh dedikasi. Profesionalitas guru dapat diamati dari performansi dan kompetensinya. Sementara dedikasi guru dapat dilihat dari kecintaannya terhadap profesi sehingga membuahkan semangat bekerja dengan sepenuh hati. Bagi pendidik sejati, mendidik layaknya memberikan hati pada peserta didik.

Secara teori, tingkat kesejahteraan selalu berkorelasi positif dengan kinerja. Semakin baik kesejahteraan maka semakin baik pula kinerja. Karena itu jangan heran jika ditemukan banyak guru yang mengajar di sejumlah lembaga pendidikan. Hal itu terpaksa dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian meningkat. Jika guru tidak fokus mendidik, bagaimana layanan pendidikan bermutu dapat diwujudkan?

Pemerintah memang telah memberikan tunjangan profesi pendidik (TPP) guru yang tersertifikasi. Tetapi jika dihitung secara total, gaji guru tersertifikasi masih di bawah UMP. Itu pun dengan catatan TPP dibayarkan pemerintah setiap bulan. Padahal faktanya TPP tidak dibayarkan setiap bulan. Bahkan ada guru yang tidak menerima TPP hingga lima tahun. Kejadian ini dialami guru-guru di bawah naungan kementerian agama (Kemenag).

Jika mengacu pada konstitusi, idealnya pemerintah yang menanggung gaji dan tunjangan guru, termasuk guru swasta. Tetapi pemerintah jelas memiliki keterbatasan biaya. Apalagi menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), jumlah guru secara nasional kini mencapai 5.186.692 orang dengan rincian; 2.607.311 guru PNS dan 1.579.381 guru swasta. Dengan jumlah guru yang demikian besar maka terasa berat anggaran yang harus ditanggung pemerintah.

Karena itulah sinergi pemerintah dan swasta untuk memperbaiki kesejahteraan guru sangat penting. Jika pemerintah-swasta belum mampu memberikan kesejahteraan yang ideal, setidaknya guru memperoleh layanan agar dapat hidup lebih layak. Layanan itu dapat berbentuk bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar guru dan keluarganya seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Setiap pendidik sejati pasti menyadari bahwa pilihan menjadi guru merupakan panggilan hati. Pasti tidak terbayang dalam pikiran

guru bahwa ia akan hidup mewah dan bergelimang harta dengan menjadi pendidik. Yang ada dalam benak guru adalah mencetak generasi masa depan yang lebih baik. Tidak ada yang lebih membahagiakan hati guru kecuali melihat anak didiknya sukses. Karena itulah kita harus memuliakan profesi guru dengan cara menyejahterahkan mereka.

Revitalisasi Fungsi Unas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya memastikan ujian nasional (Unas) 2015 tetap dilaksanakan. Meski tetap diselenggarakan, skema Unas 2015 akan dimodifikasi. Salah satu perubahan yang pasti dilakukan adalah revitalisasi fungsi unas. Mendikbud Anies Baswedan menegaskan, Unas 2015 hanya akan difungsikan sebagai pemetaan pemerataan mutu pendidikan.

Dengan demikian, unas tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Revitalisasi fungsi Unas jelas menjadi kabar gembira bagi *stakeholder* pendidikan. Dengan memfungsikan Unas untuk pemetaan mutu pendidikan, penentuan kelulusan siswa diserahkan kepada sekolah. Kebijakan Kemendikbud itu sekaligus menjadi tantangan bagi guru.

Pertanyaannya, sudah siapkah guru menilai siswa dengan penuh tanggung jawab? Pertanyaan itu wajib dijawab secara jujur oleh guru. Sebab, di tengah situasi masyarakat yang cenderung saling tidak percaya (*low trust*), keputusan apa pun menjadi perdebatan. Rasanya, sudah waktunya kita percaya pada kemampuan guru. Para guru pasti

siap mengambil alih otoritas untuk menentukan kelulusan siswa dengan cara penilaian yang otentik (*authentic assessment*).

Penilaian otentik meniscayakan guru menilai apa yang seharusnya dinilai, menilai dari banyak aspek, dan menilai dari berbagai sumber. Se jauh ini, guru telah memiliki pengalaman menilai secara otentik melalui ulangan harian, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Para guru juga terbiasa menilai sikap dan perilaku siswa melalui kegiatan observasi. Dari perspektif teori evaluasi pendidikan, penilaian otentik jelas lebih kredibel daripada hasil Unas. Syaratnya, para guru menilai siswa dengan penuh kejujuran.

Ditegaskan Kemendikbud, Unas selanjutnya digunakan untuk memetakan mutu sekolah, pembelajaran guru, capaian siswa, dan dukungan orang tua. Berdasar hasil Unas itulah, pemerintah memetakan mutu pendidikan di seluruh penjuru tanah air. Kemendikbud berjanji memberikan penghargaan kepada sekolah yang berhasil. Sedangkan sekolah yang belum mencapai target akan memperoleh pembinaan secara intensif.

Persoalan yang dihadapi Kemendikbud adalah waktu pelaksanaan Unas yang semakin dekat. Jika merujuk tahun sebelumnya, umumnya Unas SMA dan SMP dilaksanakan April. Artinya, Kemendikbud hanya memiliki waktu tiga bulan untuk menyiapkan Unas. Persoalan waktu tersebut harus diperhitungkan secara cermat. Sebab, masih segar dalam ingatan publik karut-marut pelaksanaan Unas 2013.

Gara-gara mismanajemen, Unas 2013 tidak dapat dilaksanakan secara serentak. Kasus itu begitu kompleks, mulai keterlambatan pencetakan, kendala pengiriman soal, kebocoran soal, hingga jual beli kunci jawaban. Problem itu masih ditambahi dengan berbagai kasus yang menunjukkan praktik ketidakjujuran (*dishonesty*). Ironisnya, problem ketidakjujuran selalu melibatkan kepala sekolah, guru, dan siswa. Publik pun mengenang Unas 2013 sebagai yang terburuk sepanjang sejarah.

Jika tidak ingin karut-marut Unas 2013 terulang, Kemendikbud harus menyiapkan kebutuhan logistik dengan baik. Untuk itu, Kemendikbud harus berpacu dengan waktu. Mereka tidak boleh lagi banyak berwacana. Termasuk wacana mengganti nama Unas dengan evaluasi nasional (enas). Apalagi jika pergantian itu sekadar nama. Ibaratnya hanya berganti baju.

Sebelumnya, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) juga

mewacanakan rancangan kriteria kelulusan Unas 2015 dengan komposisi 50:50. Wacana itu jelas tidak produktif di tengah persiapan dinas pendidikan, sekolah, guru, siswa, dan orang tua dalam menghadapi Unas. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Unas pasti kebingungan jika terlalu banyak wacana.

Harus diakui, wacana penggantian Unas menjadi enas sangat positif sepanjang digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan. Tapi, jika masih dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam penentuan kelulusan, ujian itu akan tetap menjadi beban bagi siswa. Bahkan, beban itu tidak hanya dirasakan siswa, melainkan juga orang tua, guru, dan kepala sekolah. Sebab, tingkat kelulusan siswa selalu dijadikan alat untuk membangun citra sekolah.

Yang menarik, unas juga menjadi perhatian pejabat publik seperti presiden, menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan pimpinan dinas pendidikan. Mereka menaruh perhatian karena tingkat keberhasilan unas dapat digunakan sebagai alat pencitraan. Karena itu, banyak kepala daerah yang memerintahkan kepada dinas pendidikan untuk meningkatkan kelulusan siswa. Kepala dinas pendidikan pun memerintahkan kepala sekolah untuk menyukseskan Unas. Perintah dinas pendidikan itu ditindaklanjuti kepala sekolah dengan membentuk tim sukses Unas. Bermula dari sanalah berbagai kasus ketidakjujuran terjadi menyertai unas.

Rasanya, Mendikbud penting untuk diingatkan bahwa unas adalah produk politik. Unas merupakan kesepakatan politik pemerintah dan pihak legislatif sehingga harus dilaksanakan. Alokasi biaya untuk Unas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga disiapkan setiap tahun. Alasan itulah yang selalu dikemukakan pemerintah saat merespons tuntutan penghapusan unas.

Karena merupakan produk politik, untuk menghapus Unas, pasti dibutuhkan lobi-lobi politik. Pihak-pihak yang diuntungkan secara ekonomi pasti kehilangan jika program yang menyedot anggaran ratusan miliar itu dihapus. Di tengah problem politik itulah, keputusan Mendikbud untuk merevitalisasi fungsi Unas layak diapresiasi. Kini tantangan Mendikbud adalah meyakinkan presiden, wakil presiden, pihak legislatif, dan dinas pendidikan bahwa revitalisasi fungsi Unas merupakan langkah terbaik demi masa depan pendidikan nasional.